

**MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres	Koordinator	Eviden
1	Perencanaan Kinerja							
	a. Dalam melakukan rasionalisasi Renstra agar memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, target yang akan dirasionalisasi	Melakukan penyusunan Renstra yang memiliki keselarasan tujuan sasaran dan target	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	LHE R.1.a Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
	b. Dalam Merumuskan Indikator Kinerja Utama agar dituangkan secara berkelanjutan dan tidak sering diganti dalam periode renstra	Merumuskan Indikator yang berasaskan SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i>) dalam Renstra	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	LHE R.1.b Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
	c. Menetapkan Target Kinerja dengan memperhatikan unsur yang dapat dicapai (<i>achievable</i>)	Merumuskan target kinerja yang dapat dicapai dalam renstra	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	LHE R.1.c Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
	d. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Menyusun Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas	2 Dokumen	Triwulan I	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	LHE R.1.d Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas

2 Pengukuran Kinerja								
	Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi	4 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas	Telah Selesai	Sekretaris	LHE R.2 Rapat Pengendalian dan Evaluasi
3 Pelaporan Kinerja								
a.	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja) untuk setiap indikator kinerja.	Menyusun Laporan Kinerja Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	1 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas	Telah Selesai	Sekretaris	LHE R.3 Laporan Kinerja
b.	Memastikan penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai							

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



YOLLI ANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.
NIP. 19840723 200212 1 001



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perikanan dan Pangan

RENCANA

STRATEGIS

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan dapat disusun sebagaimana mestinya.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renacana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun bertujuan sebagai landasan arah pembangunan selama lima tahun, dengan indikator kinerja yang dirumuskan secara terukur. Penetapan sasaran dan indikator di setiap perjenjangan kinerja, ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dalam ukuran waktu yang jelas.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan diharapkan dapat terlaksana secara optimal dengan Renstra ini sebagai pondasi. Harapan besar ditujukan agar dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Pangan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Painan, 3 September 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si

NIPR19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	38
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	38
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.....	83
BAB V. PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis pada data dan kondisi faktual, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 7. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sektor perikanan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik geografis strategis. Wilayah ini terletak di pesisir bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang garis pantai mencapai 234 kilometer serta memiliki 47 pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir (BPS, 2025).

Kabupaten Pesisir Selatan dilalui 23 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung ekosistem perikanan dan ketahanan pangan daerah (BPS, 2025).

Potensi sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan. Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional (Bapanas 2025), Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 86,71. Dinas Perikanan dan Pangan (2024) melaporkan bahwa nagari rawan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah satu nagari. Ketahanan dan Kerawanan pangan diukur berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Capaian ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah tahan pangan.

Sektor Perikanan merupakan sektor yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Produksi Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 60.943 ton dengan proporsi 76% pada kegiatan penangkapan dan 24% pada kegiatan budidaya. Aspek pemanfaatan dalam sektor perikanan tergambar dari jumlah konsumsi ikan masyarakat 47,53 kg/kapita/tahun (Dinas Perikanan dan Pangan 2024). Berdasarkan data tersebut sektor perikanan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam ketahanan pangan dan struktur perekonomian daerah. Hal ini dapat menjadikannya sektor strategis untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pembangunan pada sektor perikanan dan pangan berperan Dinas Perikanan dan Pangan sebagai Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan (OPD) yang membidangi urusan pangan dan perikanan. Peran ini mendukung terwujudnya visi daerah Kabupaten Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan. Perencanaan Strategis diperlukan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung pencapaian visi daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada prinsip perencanaan yang berbasis data dan bukti, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mengacu pada pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan sinergi lintas sektor. Permendagri 86 Tahun 2017 secara

tegas mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi unsur sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis kondisi faktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7.

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan disusun dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat terukur. Salah satu misi daerah yang dijadikan acuan adalah Sentra Pangan dan Menjadi Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Lebih Sejahtera sebagai refleksi dari kontribusi ketahanan pangan sektor tersebut terhadap daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan sebagai acuan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini, Dinas Perikanan dan Pangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berbasis pada keunggulan lokal, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan adalah untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan pangan di Kabupaten secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2025-2029;

2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang perikanan dan pangan tahun 2025-2029;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan 5 (lima) tahun terakhir diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK. Penyajian pada bab ini memuat :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perikanan dan Pangan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perikanan dan Pangan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan sasaran pelayanan yang ditargetkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan

Penyusunan subbab ini ditentukan melalui Norma, Standa, dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangannya dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029. .

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkaah/upaya yang akan dilakukan. Arah kebijakan dalam renstra merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan serta arah kebijakan RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Subbab ini memuat daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perikanan dan Pangan selama periode renstra

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Anggaran

Subbab ini memuat penentuan target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dan Indikator yang disajikan

merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DNA ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perikanan dan pangan. Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan ke daerah.

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi satu Sub Bagian dan kelompok jabatan, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
3. Bidang Perikanan Budidaya yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
7. UPTD

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum, dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan asset yang jadi tanggung jawab dinas; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan dan tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penatausahaan dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang dan jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak, maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terdiri dari

- a. Kelompok Jabatan Perencanaan dan Pelaporan
- b. Kelompok Jabatan Keuangan

3. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- e. Pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan provinsi, maupun pusat;
- g. Penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
- i. Penilaian lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan lokasi sentra, perikanan budidaya yang terintegrasi;
- j. Pelaksanaan analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
- k. Pelaksanaan analisa usaha budidaya, perlindungan usaha

pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;

- l. Pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan;
- m. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat, dan produksi usaha budidaya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, perlindungan nelayan dan memfasilitasi terbentuknya usaha nelayan kecil, kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
- f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
- g. Penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
- h. Pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
- i. Pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
- j. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
- k. Pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
- l. Pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina usaha perikanan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, penyiapan pelaksanaan

- koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan

7. Jabatan Fungsional

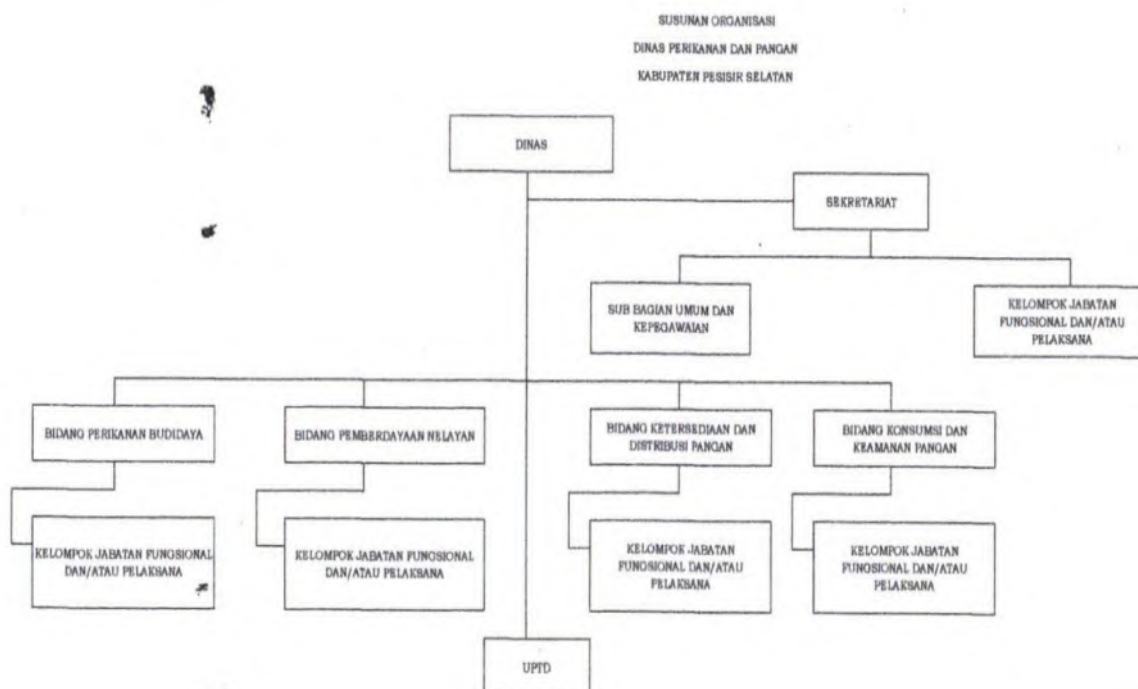
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESIR SELATAN
NO : 19 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA,
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan

a. Sumber Daya Manusia

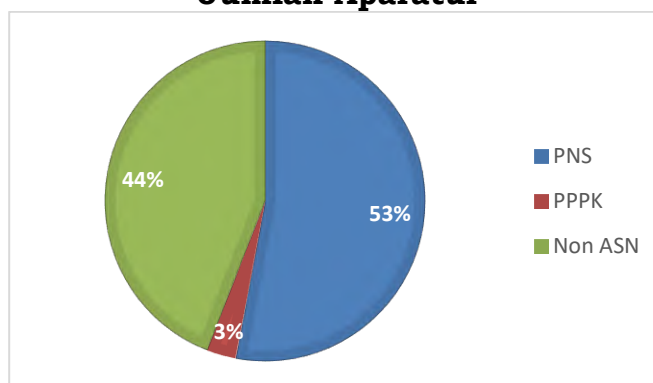
Berdasarkan kondisi per bulan September 2025, jumlah aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 68 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	36	53%
2	PPPK	2	3%
3	Non ASN	30	44%

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari PNS, PPPK dan non ASN dengan persentase 53 % PNS, 3% PPPK dan 44 % Non ASN.

Gambar 2.1
Jumlah Aparatur



Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

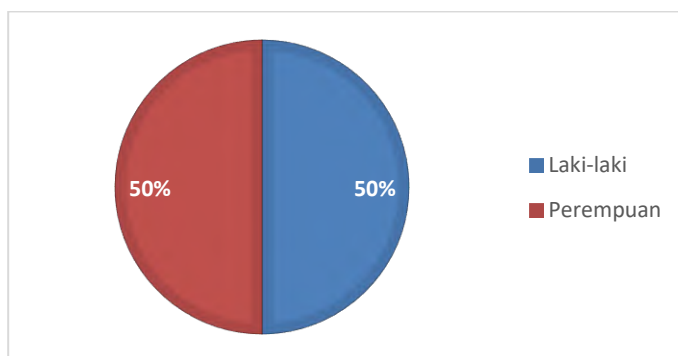
1) Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	19	50,00
2.	Perempuan	19	50,00
Jumlah		38	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

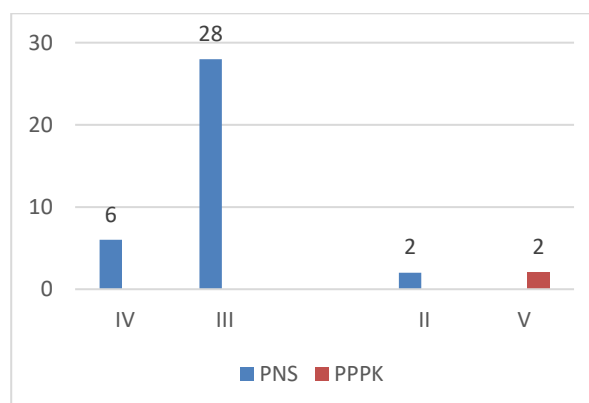
Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Grade	PNS	PPPK
1.	IV	6	0
2.	III	28	0
3.	II	2	0
4.	V	0	2
Jumlah		36	2

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh PNS golongan IV sebanyak

6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%. PPPK sebanyak 2 orang dengan grade V

3) Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

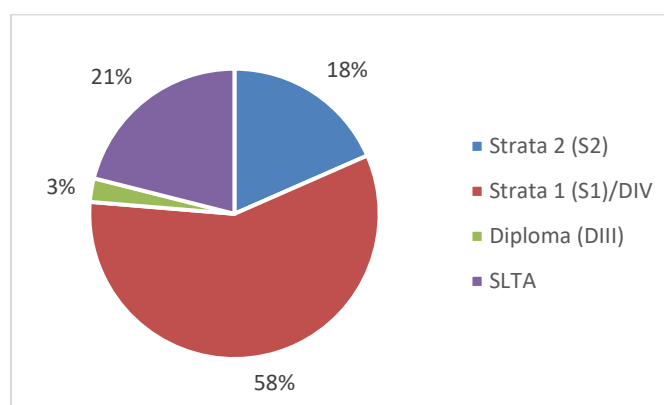
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	22	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	8	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



4) Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
5	Instalasi Lampu	2	
6	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
7	Instalasi Telepon	1	
8	Aset Lainnya	2	
9	Aset Tetap Lainnya	2	
10	Buku Pustaka	2	

Tabel 2.5.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

No	Uraian	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Total
1	Mobil	Unit	5	0	5
2	Motor	Unit	33	3	36
3	Kapal	Unit	1	0	1
4	Tanah	Sertifikat	5	0	5
5	Lemari	Buah	23	26	49
6	Kursi	Buah	141	43	184
7	Filling besi	Buah	13	8	21
8	Meja	Buah	19	58	77
9	AC	Unit	19	0	19
10	Laptop	Unit	30	6	36
11	Komputer PC	Unit	19	12	31
12	Printer	Unit	14	0	14
Total			322	156	478

Beberapa aset yang mengalami kerusakan dalam proses pengusulan panghapusan aset.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan merupakan gambaran menyeluruh dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra sebelumnya. Penilaian ini berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur pencapaian tujuan strategis, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi terhadap capaian indikator menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan. Hasil pengukuran evaluasi kinerja merupakan bentuk keberhasilan capaian dinas.

Perumusan kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi yang lebih objektif guna mencapai keberhasilan pelayanan publik. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan dan Pangan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Dinas Perikanan dan Pangan terbentuk dari penggabungan Dinas Perikanan dan Dinas Pangan pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja awal diukur berdasarkan penetapan pembentukan dinas, yaitu selama periode 2021 – 2024. Pencapaian target dapat dijelaskan melalui tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A (80)	A(80,5)	A (81)	A (81,5)	A (80,86)	A (80,97)	A (81,46)	A (81,46)	1,01	1,01	0,99	
2	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	-	-	-	-	100	100	-	-	63	93	-	-	0,63	0,93
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	80	81	82	84	80,4	86,9	88,9	88,2	1,01	1,07	1,08	1,05
4	Jumlah Produksi Perikanan	-	-	-	46.168	48.977	53.945	50.694	49.641	50.185	72.895	60.943	1,08	1,02	1,35	1,20

Berdasarkan tabel diatas terlihat rasio capaian kinerja diatas 90%. Capaian kinerja pada indikator inovasi daerah pada tahun pertama dan kedua tidak tercantum. Hal ini disebabkan setelah rasionalisasi RPJMD, Dinas Perikanan dan Pangan wajib mencantumkan inovasi daerah Rendahnya capaian tersebut. Analisa capaian kinerja dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Analisa Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Persentase Capaian Tahun ke-				Analisis	Solusi yang Dilakukan
		1	2	3	4		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	101%	101%	99%		belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	- Pengelolaan SDM - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja - Struktur Tata Kelola - Budaya dan Hubungan Organisasi
Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	-	-	63%	93%	Dengan adanya inovasi gemarikan semakin meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan penurunan angka stunting	Semakin ditingkatkannya kematangan inovasi untuk tahun berikutnya
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	101%	107%	108%	105%	Peningkatan skor PPH artinya peningkatan semakin beragamnya konsumsi pangan Masyarakat	gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA) yang akan

							meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	108%	102%	135%	120%	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar	Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan
						Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan alat tangkap ikan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 – 2024 dianalisa menggunakan anggaran dan realisasi. Penghitungan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi menggunakan metode *Compound Annual Growth Rate* (CAGR). CAGR digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan tahunan rata-rata dari suatu nilai selama periode tertentu, dengan asumsi bahwa pertumbuhan terjadi secara konsisten setiap tahun (tabel 2.8).

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Urusan Pangan	Rp 8.223.836.203	Rp 13.126.525.228	Rp 5.510.574.548	Rp 6.060.351.293	Rp 7.181.743.633	Rp 12.724.355.832	Rp 5.236.717.956	Rp 5.602.337.247	87%	97%	95%	92%	-7%	-6%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.285.513.243	Rp 5.202.293.878	Rp 5.045.574.953	Rp 5.437.042.978	Rp 6.303.174.718	Rp 4.943.685.212	Rp 4.836.771.089	Rp 5.049.607.393	87%	95%	96%	93%	-7%	-5%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 627.152.390	Rp 7.466.988.200	Rp -	Rp -	Rp 578.117.450	Rp 7.330.913.895	Rp -	Rp -	92%	98%	0%	0%	-100%	-100%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 266.026.740	Rp 187.189.750	Rp 170.000.019	Rp 560.793.415	Rp 257.922.675	Rp 182.479.200	Rp 159.498.512	Rp 498.994.504	97%	97%	94%	89%	20%	18%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 40.146.630	Rp 241.053.440	Rp 294.999.576	Rp 62.514.900	Rp 37.531.590	Rp 240.276.875	Rp 240.448.355	Rp 53.735.350	93%	100%	82%	86%	12%	9%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 4.997.200	Rp 28.999.960	Rp -	Rp -	Rp 4.997.200	Rp 27.000.650	Rp -	Rp -	100%	93%	0%	0%	-100%	-100%
Urusan Perikanan	Rp 4.076.491.912	Rp 7.967.858.746	Rp 9.624.440.505	Rp 5.012.293.831	Rp 3.993.652.363	Rp 7.750.855.741	Rp 8.721.549.109	Rp 4.835.641.068	98%	97%	91%	96%	5%	5%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.247.811.816	Rp 5.057.742.728	Rp 5.731.273.922	Rp 4.575.288.307	Rp 3.186.527.942	Rp 4.997.393.180	Rp 5.236.185.649	Rp 4.403.263.143	98%	99%	91%	96%	9%	8%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 723.502.120	Rp 1.734.957.860	Rp 1.728.272.760	Rp 374.115.974	Rp 706.029.645	Rp 1.713.535.401	Rp 1.559.543.420	Rp 369.651.825	98%	99%	90%	99%	-15%	-15%
Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Rp 105.177.976	Rp 1.175.158.158	Rp 2.164.893.823	Rp 62.889.550	Rp 101.094.776	Rp 1.039.927.160	Rp 1.925.820.040	Rp 62.726.100	96%	88%	89%	100%	-12%	-11%
T o t a l	Rp 12.300.328.115	Rp 21.094.383.974	Rp 15.135.015.053	Rp 11.072.645.124	Rp 11.175.395.996	Rp 20.475.211.573	Rp 13.958.267.065	Rp 10.437.978.315	91%	97%	92%	94%	-3%	-2%

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan negatif dari tahun awal perencanaan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar program tidak memiliki anggaran. Keterbatasan tersebut akibat dari efisiensi dari beberapa kegiatan yang diprioritaskan. Kabupaten Pesisir Selatan pada Periode 2021-2024 berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim sehingga hanya kegiatan yang prioritas yang mendapatkan pendanaan. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Dana Alokasi Khusus di Bidang Perikanan dan Bidang Pangan tidak tersedia sejak tahun ke 3 dan ke 4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi wilayah yang besar memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan perikanan dan ketahanan pangan. Identifikasi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a) Kesadaran Pelestarian Sumber Daya Alam : Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi perikanan.
- b) Produktivitas dan Daya Saing Rendah: Usaha perikanan didominasi oleh kapal kecil dengan pengolahan hasil yang masih tradisional.
- c) Integrasi Sistem Produksi: Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir menyebabkan lemahnya rantai pasok dan nilai tambah produk perikanan.
- d) Sarana dan Prasarana Terbatas: Keterbatasan fasilitas pengolahan, distribusi, dan belum tersedianya sistem jaminan mutu yang sesuai standar nasional dan ekspor.
- e) Distribusi Benih dan Indukan Unggul: Distribusi benih dan indukan unggul yang belum merata serta tingginya risiko serangan penyakit ikan, terutama pada sektor budidaya.
- f) Diversifikasi Pangan: Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat.

- g) Konsumsi Non-Beras Rendah: Ketergantungan terhadap konsumsi beras yang masih tinggi, sementara konsumsi pangan lokal non-beras seperti umbi-umbian masih rendah.
- h) Daerah Rawan Pangan: Masih adanya daerah rawan pangan, terutama di wilayah terpencil, yang memerlukan perhatian dan intervensi program bantuan pangan.
- i) Keamanan Pangan: Ditemukannya bahan berbahaya dalam makanan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Perikanan dan Pangan lima tahun ke depan antara lain:

- a) Dukungan Kebijakan dan Program: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk kebijakan dan program percepatan pembangunan perikanan.
- b) Permintaan Pasar Meningkat: Permintaan pasar terhadap hasil perikanan terus meningkat, baik dari konsumen lokal, nasional, maupun internasional.
- c) Kemajuan Teknologi Perikanan : Kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi logistik perikanan dan inovasi dalam pengolahan hasil laut, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- d) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, yang berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain.
- e) Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi peluang pasar produk pangan, yang dapat mendorong perekonomian lokal.
- f) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat mendukung percepatan kesadaran terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi.
- g) Perkembangan teknologi informasi, transportasi dan infrastruktur menjadi penunjang penting dalam memperkuat sistem pangan lokal.
- h) Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang melimpah memberikan potensi besar untuk produksi pangan berkelanjutan.

- i) Perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung program diversifikasi pangan berbasis lokal.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan kondisi aktual yang masih relevan untuk lima tahun ke depan. Namun, berbagai peluang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, terutama dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat peran teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perikanan yang berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan urusan pemerintahan, kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan dan Pangan meliputi sasaran layanan urusan pangan dan perikanan. Kelompok sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Urusan Pangan
 - Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - Rumah Tangga Rawan Pangan
 - Nagari Rawan Pangan
 - Balita *Stunting*
- Urusan Perikanan
 - Nelayan, individu atau tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Pembudidaya, individu atau tergabung ke dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
 - Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, individu atau tergabung ke dalam kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)

2.1.5 Mitra Dinas Perikanan dan Pangan

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Perikanan terbagi atas urusan perikanan dan urusan pangan. Optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam tercapainya tujuan. Mitra Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Badan Pangan Nasional
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

Dinas Perikanan dan Pangan selaku pelaksana teknis kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan PDRB, mewujudkan ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja. Upaya mewujudkan hal tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Bidang Perikanan

1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.
2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional
3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut
8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.

2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.
3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal
5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan
6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, Dinas Perikanan dan Pangan perlu merumuskan isu strategis dengan memperhatikan isu lingkungan dinamis global, nasional dan regional. Perumusan ini mencakup hasil telaahan atas laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2024, serta dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Provinsi Sumatera Barat di bidang pangan dan perikanan (lampiran 1). Berdasarkan analisa dan telaahan tersebut dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.
4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman(B2SA).
5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.

7. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal.
8. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.
9. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
10. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
11. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Dinas Perikanan dan Pangan. Dinas Perikanan dan pangan memiliki yang menggambarkan arah pembangunan pada bidang pemerintahan kelautan dan perikanan serta bidang pangan. Tujuan dijabarkan secara spesifik pada sasaran Dinas Perikanan dan Pangan yang disertai oleh indikator yang terukur. Perumusan ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi sektoral dan isu-isu strategis yang berkembang. Rincian tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN											
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86,71	87,47	88,23	91,98	93,47	95,15	96,35	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0	1,76	1,86	2	2,21	2,87	2,96	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	92,96	93,71	94,46	95,22	95,98	96,75	97,53	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,49	81,6	81,75	81,94	82,18	82,47	83	
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93	80	81	82	83	84	85	
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkelanjutan dan Strategis		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	68.213,86	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan yang berfokus pada ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Perumusan strategi dalam Renstra ini didasarkan pada prinsip perencanaan berbasis data, sistematis,

dan terukur, yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan strategi ini merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa strategi disusun berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal. Selain itu, strategi juga dirancang dengan memperhatikan kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan perikanan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar.

Strategi yang telah disusun menjadi pedoman dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih operasional melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap strategi diarahkan untuk memastikan pelaksanaan intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan di bidang ketahanan pangan dan perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I 2025	Tahap II 2026	Tahap III 2027	Tahap IV 2028	Tahap V 2029
Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat
Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rumusan teknis dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down-bottom-up*, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan arah kebijakan mempertimbangkan tantangan, isu strategis, serta potensi dan peluang yang telah teridentifikasi dari kondisi internal maupun eksternal.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan	Ket
1.	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona	1. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).	
2.	Peningkatan Produksi Budi Daya Berkelanjutan		2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	
			3.Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.	
			4. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.	
			5. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.	
			6. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.	
			7. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.	
			8. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.	
3.	Penguatan diversifikasi dan konsumsi pangan	1. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	1. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.	
		2. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan	
		3. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).	1. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.	
			2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).	
4.	Penguatan penanganan Kerawanan Pangan	4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.	
5	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan	1. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.	

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan ini ditujukan agar pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dapat berjalan terarah, dan konsisten dengan prioritas pembangunan daerah. Rincian strategi dan arah kebijakan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan				
Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor PPH	Peningkatan ketersediaan pangan dan Penguatan Distribusi Pangan	1. Mendukung penjaminan ketersediaan pangan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pangan
				2. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.
				3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.
				4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.
				5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan
				2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).
				1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).
				2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
				3. Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.

			Penguatan daya saing hasil perikanan melalui peningkatan mutu, pengolahan, dan pemasaran	1. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.
				2. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.
				3. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.
			Penguatan kelembagaan, SDM, dan tata kelola pembangunan perikanan.	1. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.
				2. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN							
Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)		
					Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)		
		Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
					Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

pangan unggulan	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Inovasi (Inovasi)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

				Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Persentase Konsumsi Energi (%)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan MASYARAKAT	
					Persentase Konsumsi Protein (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

				Cadangan Pangan Daerah	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan		
			Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
				Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
			Optimalnya Penanganan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan		

			Kerawanan Pangan		Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)		
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
				Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

				3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
		Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
	Meningkatnya Produksi	Optimalnya Pemberdayaan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

			Perikanan Budidaya	Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	

				Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K ET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.233.086 .900		8.228.500 .000		9.009.000. 000		9.860.50 0.000		10.802.00 0.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.980.000 .000		6.578.000 .000		7.236.000. 000		7.960.00 0.000		8.756.000 .000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	5.980.000 .000	1	6.578.000 .000	1	7.236.000. 000	1	7.960.00 0.000	1	8.756.000 .000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0	0,18		0,23		0,29		0,35		0,64			
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretari at yang dicapai (%)	100	100		100		100		100		100			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.0 00		174.000.0 00		181.000.0 00		200.000. 000		250.000.0 00		
Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	1	165.000.0 00	1	174.000.0 00	1	181.000.0 00	1	200.000. 000	1	250.000.0 00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen	1	5		5		5		5		5			

	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5	60.000.000	5	63.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3	15.000.000	3	16.000.000	3	17.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	60.000.000	6	63.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	100.000.000		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.451.000.000		4.594.000.000		4.817.000.000		5.300.000.000		5.960.000.000		
Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.451.000.000	36	4.594.000.000	36	4.817.000.000	40	5.300.000.000	50	5.960.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.200.000.000		4.340.000.000		4.550.000.000		5.000.000.000		5.650.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.200.000.000	36	4.340.000.000	36	4.550.000.000	40	5.000.000.000	50	5.650.000.000		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				210.000.000		210.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1	210.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		

2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				69.000.000		73.000.000		75.000.000		82.000.000		82.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	69.000.000	1	73.000.000	1	75.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		26.000.000		27.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	4	10.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		

	pada SKPD (Laporan)													
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.000.000		36.000.000		37.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	34.000.000	1	36.000.000	1	37.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		55.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		55.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.000.000		427.000.000		464.000.000		495.000.000		574.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	358.000.000	1	427.000.000	1	464.000.000	1	495.000.000	1	574.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	24.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.500.000		30.000.000		31.000.000		35.000.000		40.000.000		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	28.500.000	12	30.000.000	12	31.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		36.000.000		36.500.000		37.500.000		38.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	37.500.000	1	38.500.000		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000		240.000.000		480.000.000		530.000.000		350.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	180.000.000	70	240.000.000	70	480.000.000	35	530.000.000	35	350.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8		8		9		22		10			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.000.000		200.000.000		280.000.000		250.000.000		200.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	140.000.000	70	200.000.000	70	280.000.000	35	250.000.000	35	200.000.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		200.000.000		280.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8	40.000.000	8	40.000.000	9	200.000.000	22	280.000.000	10	150.000.000		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000		408.000.000		431.000.000		460.000.000		495.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	395.000.000	1	408.000.000	1	431.000.000	1	460.000.000	1	495.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.000.000		98.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	95.000.000	1	98.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000		
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		160.000.000		161.000.000		170.000.000		175.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	150.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.000.000		607.000.000		718.000.000		818.000.000		970.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	312.000.000	1	607.000.000	1	718.000.000	1	818.000.000	1	970.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66		66		66		66		66			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				58.000.000		61.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1	1	58.000.000	1	61.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		175.000.000		261.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39	150.000.000	39	175.000.000	39	261.000.000	39	300.000.000	39	350.000.000		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	16.000.000	20	16.000.000	20	17.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66	23.000.000	66	25.000.000	66	25.000.000	66	30.000.000	66	30.000.000		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	40.000.000	5	180.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		

2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	85	100	515.000.000	100	550.500.000	100	591.000.000	100	636.500.000	100	692.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	14,15	40		60		80		100		100			
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	515.000.000	2	550.500.000	2	591.000.000	2	636.500.000	2	692.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	0	4		4		4		4					
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				500.000.000		535.000.000		575.000.000		620.000.000		675.000.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	500.000.000	2	535.000.000	2	575.000.000	2	620.000.000	2	675.000.000		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	0	4	15.000.000	4	15.500.000	4	16.000.000	4	16.500.000	4	17.000.000		

	Infrastruktur Logistik (Laporan)													
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				567.099.700		909.000.000		975.000.000		1.042.000.000		1.096.000.000		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Protein (%)	91	97	567.099.700	98	909.000.000	99	975.000.000	100	1.042.000.000	100	1.096.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.460	2.600		2.650		2.650		2.700		2.700			
	Persentase Konsumsi Energi (%)	93	98,5		98,8		99		99,2		99,2			
	Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	68	72		73		75		75		75			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				330.042.400		405.000.000		430.000.000		485.000.000		510.000.000		
Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	330.042.400	12	405.000.000	12	430.000.000	12	485.000.000	12	510.000.000		
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40		60		80		100		120			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1	30.000.00 0	1	33.000.00 0	1	34.000.00 0	1	35.000.0 00	1	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan				50.000.00 0		70.000.00 0		90.000.00 0		110.000. 000		130.000.0 00		

Ketahanan Pangan Keluarga														
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40	50.000.000	60	70.000.000	80	90.000.000	100	110.000.000	120	130.000.000		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				80.042.400		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12	80.042.400	12	120.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		

Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				167.057.3 00		389.000.0 00		400.000.0 00		412.000. 000		436.000.0 00		
Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	167.057.3 00	21	389.000.0 00	21	400.000.0 00	21	412.000. 000	21	436.000.0 00		
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10		21		21		21		21			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				142.056.9 00		330.000.0 00		340.000.0 00		350.000. 000		370.000.0 00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	142.056.9 00	21	330.000.0 00	21	340.000.0 00	21	350.000. 000	21	370.000.0 00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				25.000.40 0		59.000.00 0		60.000.00 0		62.000.0 00		66.000.00 0		
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10	25.000.40 0	21	59.000.00 0	21	60.000.00 0	21	62.000.0 00	21	66.000.00 0		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				70.000.00 0		115.000.0 00		145.000.0 00		145.000. 000		150.000.0 00		

Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	70.000.000	1	115.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	50.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				140.987.200		158.000.000		173.000.000		187.000.000		222.000.000		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	25	140.987.200	20	158.000.000	15	173.000.000	10	187.000.000	5	222.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		

Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000		113.000.000		124.000.000		135.000.000		166.000.000		
Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	110.000.000	1	113.000.000	1	124.000.000	1	135.000.000	1	166.000.000		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				80.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000		

2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	3,7	8,7	30.000.000	11,2	33.000.000	13,7	34.000.000	16,3	35.000.000	16,3	36.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.110.000.000		4.058.000.000		4.376.300.000		4.652.930.000		5.102.300.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.445.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		2.870.000.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	42.628,31	47.263,5	2.445.000.000	48.016,82	2.720.000.000	48.782,15	2.770.000.000	49.559,68	2.820.000.000	50.760,45	2.870.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.395.000.000		2.670.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	2.395.000.000	5	2.670.000.000	5	2.720.000.000	5	2.770.000.000	5	2.820.000.000		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	100		105		110		115		120			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20		20		20		20		20			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				2.275.000.000		2.550.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		

Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	130	2.275.000.000	135	2.550.000.000	140	2.600.000.000	145	2.650.000.000	150	2.700.000.000		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30	300.000.000,00	30	310.000.000,00	30	320.000.000,00	30	330.000.000,00	30	340.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				415.000.000		1.083.000.000		1.351.300.000		1.572.930.000		1.972.300.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	14.183,66	15.725,7	415.000.000	15.977,31	1.083.000.000	16.232,95	1.351.300.000	16.492,68	1.572.930.000	16.893,75	1.972.300.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				115.000.000		750.000.000		1.005.000.000		1.215.500.000		1.581.550.000		

Optimalnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	115.000.000	6	750.000.000	6	1.005.000.000	6	1.215.500.000	6	1.581.550.000		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2		9		12		15		18			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1		5		5		5		5			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		670.000.000		920.000.000		1.120.000.000		1.480.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2	50.000.000	9	670.000.000	12	920.000.000	15	1.120.000.000	18	1.480.000.000		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1	50.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.500.000	5	66.550.000		

3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terpenuhiya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	15.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				300.000.000		333.000.000		346.300.000		357.430.000		390.750.000		
Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	300.000.000	30	333.000.000	30	346.300.000	35	357.430.000	35	390.750.000		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		44.200.000		

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	44.200.000		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		230.000.000		230.000.000		250.000.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		50.000.000		25.000.000		27.000.000		30.000.000		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	50.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000	35	60.500.000	35	66.550.000		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		

Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0	324,99	210.000.000	488,24	210.000.000	756,77	210.000.000	1.172,99	210.000.000	1.559,66	210.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,77	35,69		35,73		35,78		35,83		35,83			
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		

Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Skala Usaha dan Risiko														
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
6.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana table berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	81,49	81,60	81,75	81,94	82,18	82,47	83	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	60.942,68	62.000	63.304,20	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	
5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	93	80	81	82	83	84	85	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan dan Pangan

INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

Persentase Jumlah Cadangan Pangan	komulatif	Persentase	14,15	20	40	60	80	100	100	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Positif	Ton	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan , disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

LAMPIRAN

1. Perumusan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global *	Nasional **	Regional ***	
1.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penghasil pangan pokok terbesar di Sumatera Barat	1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Terdapat <i>hidden cost</i> dari aspek lingkungan, sosial dan kesehatan akibat pola konsumsi pangan tidak sehat	1. Akses Pangan yang tidak merata	1. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan	1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
		2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.		2. Ketimpangan beban dan manfaat yang ditanggung berupa masalah distribusi, keamanan pangan dan gizi yang diterima konsumen	2. Sebaran Wilayah Produksi di daerah tertentu menyebabkan distribusi searah	2. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan	2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
		3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).		3. Minimnya Integrasi Biaya Sosial-Lingkungan dalam Kebijakan Publik dan Harga Pangan	3. Rantai Distribusi yang panjang menyebabkan disparitas harga	3. Masih ditemuinya daerah rawan pangan	3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.

		4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan local			4. Peningkatan Jumlah Penduduk	4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
		5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan			5. Belum Idealnya Pola Pangan harapan Masyarakat	5. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal	5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
		6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan			6. Keamanan Pangan	6. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal	6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.
2.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan perikanan	1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Ketimpangan perkembangan akuakultur antarwilayah	1. Peningkatan Jumlah Penduduk	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan	1. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal
		2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional		2. Penurunan stok ikan	2. Degradasi Laut dan Polusi	2. Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap melalui alokasi yang profesional antara stok sumberdaya ikan, kemampuan sumberdaya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan	2. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.

3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya		3. Keterbatasan Perlindungan Nelayan Kecil	3. IUU dan Overfishing	3. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan	3. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		4. Ancaman perubahan iklim & polusi laut	4. Perubahan Iklim	4. Peningkatan inovasi teknologi pembenihan dan induk unggul komoditas strategis	4. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar		5. Potensi limbah yang belum dioptimalkan		6. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya	5. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan				7. Diversifikasi konsumsi produk olahan ikan	
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut				8. Penyediaan penyaluran bantuan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang terkena dampak perubahan iklim/ bencana	

		8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				9. Pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan, serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan	
		9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.				10. Masih rendahnya daya saing produk hasil perikanan	

*FAO. 2024. The State of Food and Agriculture 2024 – Value-driven transformation of agrifood systems.

FAO. 2024. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action.

** Rancangan Awal Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024

***Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
1.	Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	Hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada level Perangkat Daerah (PD) oleh Inspektorat Daerah	$\sum_{i=1}^n (B_i \times N_i)$ B_i = Bobot komponen ke-i N_i = Nilai capaian komponen ke-i (skala 0-100) n = Jumlah komponen yang dinilai
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	Nilai Kematangan dari inovasi yang dilakukan	Nilai kematangan inovasi berdasarkan aplikasi IGA
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	Susunan konsumsi pangan yang terdiri dari berbagai kelompok pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, budaya lokal, serta potensi sumber daya daerah, untuk mewujudkan gizi seimbang dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.	Akumulasi capaian konsumsi pangan
3.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	ton	Jumlah hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan perikanan dalam kurun waktu tertentu yang dihitung dalam satuan berat (ton)	Akumulasi produksi perikanan
NO	SASARAN TAKTIKAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	Peningkatan nilai AKIP per Tahun	$\frac{\text{Nilai tahun } n+1 - \text{Nilai tahun } n}{\text{Nilai tahun } n} \times 100\%$
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	%	Persentase kinerja bidang tercapai dalam fisik dan keuangan	Hasil pengukuran aplikasi simbangda
		Jumlah Inovasi	Tanpa Satuan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	%	Meningkatkan Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertangani)*100%
2.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	Kg/Kapita/Tahun	ukuran jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu dalam suatu daerah	Ketersediaan Protein Pangan / (jumlah penduduk*365)*100%
		Angka Ketersediaan Protein	gr/kapita/tahun	persentase jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita penduduk dalam bentuk protein	Ketersediaan Pangan Pokok yg dikonsumsi/ (jumlah penduduk*365)*100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif	%	Persentase Gapoktan LPM yang aktif	(Jumlah LPM/Jumlah LPM yg aktif)*100%
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
4.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%		
5.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi Persentase Konsumsi Protein	% %		
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
6.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton		
7.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan	ton Kg/Kapita/Tahun		
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton		
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1	Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase dokumen publik dan dipublish Jumlah Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	% Dokumen		
	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen		
	Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan	Dokumen		
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
2	Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan yang ditangani Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia	Rumah Tangga Dokumen	Meningkatnya pengelolaan penanganan Nagari Rawan Pangan Dokumen Analisa Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertangani)*100% Jumlah dokumen FSVA yang tersedia
3	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan	ton	Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	Cadangan Pangan Masyarakat + Cadangan Pangan Pemerintah

5.	Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	- Jumlah Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan - Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan	Lembaga Lumbung Pangan Dokumen	Lumbung Pangan Masyarakat yang melaksanakan peningkatan kapasitas upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di daerah yang rawan pangan	Jumlah LPM yang melaksanakan peningkatan kapasitas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan GPM
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
6.	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	- Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian	Jumlah rekomendasi
7.	Optimalnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan	%	Keragaman konsumsi pangan perkelompok pangan merujuk pada variasi dan perbedaan dalam konsumsi pangan antara kelompok pangan berbeda	
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
8.	Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	- Jumlah SOP dan Layanan tempat pendauran ikan - Jumlah data dan informasi Perikanan Tangkap	ton Dokumen		
9.	Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	- Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya - Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan kemitraan usaha	Orang Kelompok		
10.	Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Pengujian Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha mikro dan kecil - Jumlah Rekomendasi SKP Produk Unit Usaha/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia	Rekomendasi Dokumen Unit		
11.	Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memperoleh pembinaan dan pelatihan teknis - Jumlah Pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan - Jumlah promosi hasil perikanan dalam rangka pencapaian Angka Konsumsi Ikan	Unit Usaha Pelaku Usaha Kegiatan		
BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN					
12.	Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Pembudidayaan ikan yang meningkat pendapatannya - Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya - Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi - Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Orang ha ekor Dokumen	Paket bantuan yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan pembudidayaan ikan Pertambahan Luas Lahan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan Produksi benih budidaya air tawar dan air payau yang dihasilkan Pengambilan sampel air pada kelompok untuk diuji kualitas airnya	Jumlah pembudidayaan yang meningkat pendapatannya Jumlah pertambahan luas lahan Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi BBI dan UPR Jumlah dokumen Pengujian Kualitas Air
13.	Optimalnya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/dan iptek dan penguatan kelembagaannya)	Orang	Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan	Jumlah Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan dan Pangan**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
Jabatan : **Bupati Pesisir Selatan**

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN**


(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**


(FIRDAUS, S.Pi)
NIR 1970621 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,0
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Jumlah Produksi Perikanan	50.694

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 5.122.275.538	-
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 313.395.910	-
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 62.514.900	-
4	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 4.475.288.407	-
5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 374.116.084	-
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 42.889.550	-
Jumlah		Rp 10.390.480.389	-

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
Bupati Pesisir Selatan

(Drs. RUSMA YULIANWAR, M.Pd.)

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 1970062114993031006



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pihak Pertama
**SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	- Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi - Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi - Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	100% 0 Delay Laporan 91%-100% (Sangat Baik)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.122.275.538	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 39.347.527	
	Sub Kegiatan		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 39.347.527	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.273.740.357	
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.053.480.557	
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 210.260.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.999.800	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 351.438.145	
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 8.056.400	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.050.000	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 39.095.090	
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.516.155	
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.400.000	
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7.727.500	
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 271.593.000	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 254.539.509	
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 108.000.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 146.539.509	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 203.210.000	
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 56.600.000	
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 115.200.000	
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.450.000	
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 16.960.000	
Jumlah		5.122.275.538	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
SEKRETARIS

(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Reni Susanti, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **Perencana**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua
SEKRETARIS**


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
**Pihak Pertama
PERENCANA**


Reni Susanti, S.Pi., M.Si
NIP. 19750417 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANA
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan dan Pangan Yang Disusun	4 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	5 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 39.347.527	
	Sub Kegiatan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 39.347.527	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.273.740.357	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.053.480.557	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 210.260.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.999.800	
	Jumlah	4.313.087.884	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PERENCANA

(RENI SUSANTI, S.Pi., M.Si.)
NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Elka Masriza, A.Md**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Elka Masriza, A.Md
NIP. 19860426 201001 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas PNS Dinas Perikanan dan Pangan	Tersedianya SKP PNS di Lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan - Tersedianya administrasi penunjang umum dan kepegawaian	1 Dokumen 5 Dokumen
2.	Terlaksananya inventarisasi aset Dinas Perikanan Pangan yang baik	Tersedianya Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F	1 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 351.438.145	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.056.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.050.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 39.095.090	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.516.155	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7.727.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 271.593.000	
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 254.539.509	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 108.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 146.539.509	
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 203.210.000	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Rp 56.600.000	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Rp 115.200.000	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 16.960.000	
	Jumlah	Rp 809.187.654	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLLYAANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ELKA MASRIZA, A.Md
NIP. 19860426 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Ermi Rahmasari**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua
SEKRETARIS**


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


Ir. Ermi Rahmasari
NIP. 19671008 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Dokumen
2.	Terlaksananya identifikasi, inventarisasi, Monitoring, evaluasi dan Pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan PAD	12 Dokumen
3.	Terlaksananya Verifikasi Keuangan	Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen

Pihak Kedua
SEKRETARIS


(YOLITA AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


(Ir. ERMIRAHMASARI)
NIP. 19671008 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eda Putri Santi, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


Eda Putri Santi, S.Pi
NIP. 19921001 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan tepat waktu	
		- Mengajukan Dana UP, GU dan TU	12 bulan
		- Menyiapkan bahan rekonsiliasi keuangan	12 bulan
		- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	12 bulan
		- Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	12 bulan

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLIAANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan


(EDA PUTRI SANTI, S.Pi)
NIP. 19921001 201903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maya Fitri Zuly, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


Maya Fitri Zuly, S.Pi
NIP. 19961230 202012 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan tepat waktu - Mengajukan Dana UP, GU dan TU - Menyiapkan bahan rekonsiliasi keuangan - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran - Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLLYAANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(MAYA FITRI ZULY, S.Pi.)
NIP. 19961230 202012 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Randi Fitriadi, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

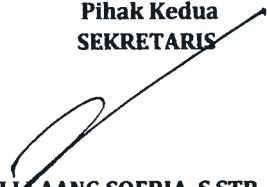

Randi Fitriadi, S.Pi., M.Si
NIP. 19920405 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 Dokumen
2.	Membantu menyiapkan Laporan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan	Jumlah Laporan Yang disusun	6 Laporan

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS


(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan


(RANDI FITRIADI, S.Pi., M.Si)
NIP. 19920405 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rozi Yusrialdi, S.Pi**
Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


Rozi Yusrialdi, S.Pi
NIP. 19910131 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu penataan aset Dinas Perikanan dan Pangan	- Jumlah Aset yang ditata baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. - Tersedianya Kartu Inventaris Barang A, B, C, D dan E - Laporan Aset Dinas Perikanan dan Pangan	12 bulan 1 dokumen 12 bulan

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLLYAANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(ROZI YUSRIADI, S.Pi)
NIP. 19910131 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Syaifuddin A**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

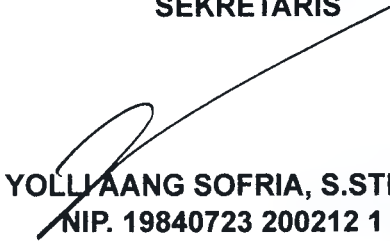
Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

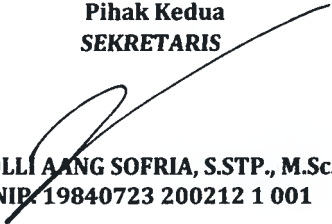

Syaifuddin A
NIP. 19720104 199308 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan yang dilakukan - SKP	42 ASN

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS


(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


(SYAIFUDDIN. A.)
NIP. 19720104 199308 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RULI IKA FALDI, S.IP**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


RULI IKA FALDI, S.IP
NIP. 19831201 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala	8 Dokumen
		Jumlah Dokumen Impassing ASN Dinas Perikanan dan Pangan	36 Dokumen

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(RULI IKA FALDI, S.IP)
NIP.19831201 201001 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Syamsuardi**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


Syamsuardi
NIP. 19740414 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Pelayanan yang dilakukan	12 bulan
		- Mengagendakan Surat Masuk dan Keluar	12 bulan
		- Menyiapkan perlengkapan apel	12 bulan

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS

(YOLIA AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

(SYAMSUARDI)
NIP. 19740414 200801 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36,085

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya		
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	7,989,949
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp	7,989,949
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4,467,298,458
	Sub Kegiatan		
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp	4,460,026,458
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp	7,272,000
	Jumlah	Rp	4,475,288,407

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

(AFRIMAN JULIA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36,085

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya		
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	7,989,949
	Sub Kegiatan		
a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp	7,989,949
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4,467,298,458
	Sub Kegiatan		
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp	4,460,026,458
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp	7,272,000
	Jumlah	Rp	4,475,288,407

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN


(AFRIMAN JULITA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIA DESYANTI, S.E**
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

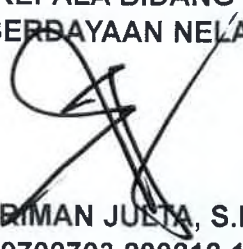
Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

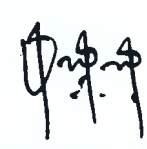
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN


AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP


MARIA DESYANTI, SE
NIP. 19770317 200902 2 004

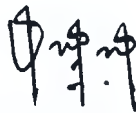
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	145 Orang

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN


(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP


(MARIA DESYANTI, SE)
NIP. 19770317 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULIAR SYAM, SE**
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN**


AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
**Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**


YULIAR SYAM, SE
NIP. 19730107 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	12 Dokumen

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

(AFRIMAN JULTA, S.Ni)
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

(YULIARSYAM, SE)
NIP. 19730107 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SILVINA GRANITA, S.Pi**
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

SILVINA GRANITA, S.Pi
NIP. 19760627 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Pendapatannya	145 Orang

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

(APRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 2002121 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

(SILVINA GRANITA, S.Pi.)
NIP. 19760627 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEWA RESTU Rianto, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN


AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN


DEWA RESTU Rianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19960514 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu pelayanan administrasi Bidang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah pelayanan administrasi - Pengumpulan data peningkatan kapasitas nelayan kecil - Laporan Perkembangan Penyerahan Sarpras	 1 dokumen 1 dokumen

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

(DEWA RESTU RIAN TO, S.Pi.)
NIP. 19960514 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARMON ZAMORA**
Jabatan : Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

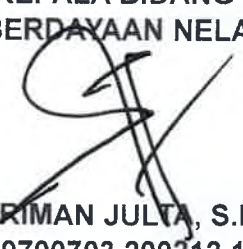
Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN


AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENATA SARANA DAN PRASARANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN


HARMON ZAMORA
NIP. 19760704 200801 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu pelayanan administrasi Bidang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah pelayanan administrasi yang dilakukan	
		- data Pemberian Sarana dan Prasarana Perikanan	1 dokumen
		- Laporan perkembangan pemberian sarana dan prasarana perikanan	1 dokumen
		- SPJ Kegiatan	12 bulan

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan
Nelayan

(AFFMAN JULITA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikana

(HARMON ZAMORA)
NIP. 19760704 200801 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FIRDAUS, S.Pi
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	14.608

No.	Program		Anggaran	Keterangan
I.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	-	
1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp	250.073.450	
a.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp	250.073.450	
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp	124.042.634	
a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	124.042.634	
	Jumlah		374.116.084	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA


(HENRI SUSIOWATI, S.Pi. M.Si.)
NIP. 19720905 199903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt
Jabatan : Analis Akuakultur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS AKUAKULTUR

DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt
NIP. 19731224 200801 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS AKUAKULTUR
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Pendapatannya	50 RTP
		Jumlah Peningkatan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan , Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



(HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si.)
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS AKUAKULTUR



(DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.)
NIP. 19731224 200801 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADIKO ZUNANDI, S.Pi**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

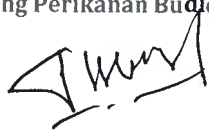
Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ADIKO ZUNANDI, S.Pi
NIP. 19890522 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan pelayanan administrasi seksi Pembenihandan Pembesaran Ikan	Jumlah pelayanan administrasi - Produksi Benih Ikan Bermutu - SPJ kegiatan - pengawasan BBI	12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan



ADIKO ZUNANDI, S.Pi
NIP. 19890522 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKMAN
Jabatan : Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENATA SARANA DAN PRASARANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

LUKMAN
NIP. 19681017 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu pelayanan administrasi Bidang Perikanan Budidaya	Jumlah pelayanan administrasi yang dilakukan - data Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya - data kelompok pembudidaya ikan	1 dokumen 1 dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikan:



LUKMAN
NIP. 19681017 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSILAWATI, S.Pi
Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA KESEHATAN IKAN

SUSILAWATI, S.Pi
NIP. 19810704 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA KESEHATAN IKAN
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	100 kolam
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Kelompok

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



(HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si.)
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
PENGELOLA KESEHATAN IKAN



(SUSILAWATI, S.Pi.)
NIP. 19810704 200604 2 008



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan Yang Bebas Bahan Berbahaya	8.0%
2.	Meningkatnya Diversifikasi ketahanan pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi	98,8%
		Persentase Konsumsi Protein	95,8%
3	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp86,035,000,000
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	44.86

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	13,396,050
	Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp	13,396,050
	Sub Kegiatan		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Rp	13,396,050
1.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	42,889,550
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	6,889,550
	Sub Kegiatan		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	6,889,550
2.	Penyediaan dan Penyalurn Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36,000,000
	Sub Kegiatan		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36,000,000
	Jumlah	Rp	56,285,600

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

(RIRI LOVITA, S.SIT.)
NIP. 19800106 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROZA LINA ALDA, SKM**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN

ROZA LINA ALDA, SKM
NIP. 19760325 200312 2 005



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG

KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

RIRI LOVITA, S.SIT

NIP. 19800106 200312 2 002

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

FIRDAUS, S.Pi.

NIP. 19700621 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan Yang Bebas Bahan Berbahaya	8.0%
2.	Meningkatnya Diversifikasi ketahanan pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi	98,8%
		Persentase Konsumsi Protein	95,8%
3	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp86,035,000,000
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	44.86

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	13,396,050
	Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp	13,396,050
	Sub Kegiatan		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Rp	13,396,050
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	42,889,550
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	6,889,550
	Sub Kegiatan		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	6,889,550
	2. Penyediaan dan Penyalurn Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36,000,000
	Sub Kegiatan		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	36,000,000
	Jumlah	Rp	56,285,600

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


(FIRDAUS, S.Pi)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROZA LINA ALDA, SKM**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Painan, 22 Januari 2024
**Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN**

ROZA LINA ALDA, SKM
NIP. 19760325 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KETAHANAN PANGAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Produk Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	3 rekomendasi
		Jumlah Poklamsar yang meningkat kapasitasnya.	3 Kelompok
2.	Meningkatnya Ragam Produk Hasil Perikanan	Jumlah Ragam Produk Perikanan Berdaya Saing	15 ragam per tahun
3	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi PSAT	5 registrasi

Pihak Kedua
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN


(ROZA LINA ALDA, SKM.)
NIP. 19760325 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASPATUTI, S.Pt**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN

ASPATUTI, S.Pt
NIP. 19731001 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Analisis Ketahanan Pangan
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan 1. Umbi-umbian 2. Protein Hewani 3. Kacang-kacangan 4. Sayur dan buah	 1,4% 10,2% 1,4% 5,2%

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Pihak Pertama
Analisis Ketahanan Pangan

(ASPI TUTU, S.Pt.)
NIP.19731001 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Pihak Pertama
**PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si
NIP. 19930822 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu melakukan penyelesaian administrasi pengolahan dan pemarkasan hasil perikanan	Jumlah laporan pembinaan penerapan standar mutu hasil perikanan	1 Laporan
2.	Membantu melakukan penyelesaian administrasi penganekaragaman pangan lokal	Jumlah Laporan Safari Gemarikan	1 Laporan

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan



(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan



(GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si)
NIP. 19930822 201903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PINTO HAPRIALDY**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

PINTO HAPRIALDY
NIP. 19830429 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu melakukan penyelesaian administrasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- Persentase Angka Konsumsi ikan	45%

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan

(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

PINTO HAPRIALDY
NIP. 19830429 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MERLYN SYAHPUTRI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI KANTOR

MERLYN SYAHPUTRI
NIP. 19840803 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan pelayanan administrasi seksi Keamanan Pangan	Jumlah pelayanan administrasi - SPJ Kegiatan	12 bulan

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan

(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

MERLYN SYAHPUTRI
NIP. 19840803 201001 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HOKI KURNIAWAN, S.Pi**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIRI LOVITA, S.SIT**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

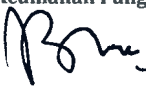
RIRI LOVITA, S.SIT
NIP. 19800106 200312 2 002

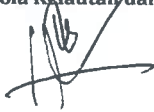
Pihak Pertama
**PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

HOKI KURNIAWAN, S.Pi
NIP. 19910213 202012 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu melakukan penyelesaian administrasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- safari Gemarikan - Jumlah pemasar ikan	2 lokasi 1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan

(RIRI LOVITA, S.SiT.)
NIP. 19800106 200003 2 002

Painan, Maret 2024
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

(HOKI KURNIAWAN, S.Pi)
NIP. 19910213 202012 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FIRDAUS, S.Pi**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN


FIRDAUS, S.Pi.
NIP. 19700621 199303 1 006


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19721108 200701 2 006

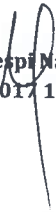
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	86%
2.	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase Ketersediaan Energi (%) - Persentase Ketersediaan Protein (%)	97% 97%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Gapoktan Lumbung Pangan yang aktif	85%

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

Painan, Maret 2024
Pihak Pertama
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan


(FIRDAUS, S.PI.)
NIP. 19700621 199303 1 006


(Drs. Yespi Nawiarsih)
NIP.19681017 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULIA NOVITA, SKM**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Pihak Pertama
Analis Ketahanan Pangan

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19721108 200701 2 006

YULIA NOVITA, SKM
NIP. 19760709 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KETAHANAN PANGAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	1 dokumen
		Tersedianya Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 laporan

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN

(Drs. YESPI NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN

(YULIA NOVITA, SKM.)
NIP. 19760709 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASWITA, S.ST**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19724108 200701 2 006

Pihak Pertama
Analis Ketahanan Pangan


ASWITA, S.ST
NIP. 19760912 200604 2 008

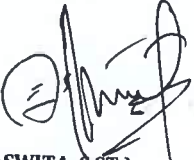
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KETAHANAN PANGAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	99,5%
		Persentase Kestabilan harga pangan pokok	95,0%
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	56%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang aktif	85%

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN

(Drs. YESPI NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 22 Januari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN


(ASWITA, S.ST.)
NIP. 19760912 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NILAM SARI TANJUNG, SE., BBA (Hons)**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19721108 200701 2 006

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

NILAM SARI TANJUNG, SE., BBA (Hons)
NIP. 19971209 202012 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu melaksanakan penyelesaian administrasi pada seksi Distribusi Pangan	Jumlah Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan Distribusi Pangan	3 dokumen
2.	Membantu melaksanakan pemantauan harga secara berkala	Jumlah Laporan Pemantauan Pasar	12 Laporan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
I	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 299.999.860	
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 299.999.860	
	Sub Kegiatan :		
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp 299.999.860	
II	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 62.514.900	
1.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 30.252.000	
	Sub Kegiatan:		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 30.252.000	
2.	Kegiatan Kerawanan Pangan Kabupaten Kota	Rp 32.262.900	
	Sub Kegiatan:		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 32.262.900	
	Jumlah	362.514.760	

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

(Drs. Yespi Nawiarsih)
NIP.19681017 198903 1 003

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(NILAM SARI TANJUNG, SE., BBA (Hons))
NIP.19971209 202012 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA SYAFUTRA, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19721108 200701 2 006

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


HENDRA SYAFUTRA, S.Pi
NIP. 19810216 201407 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Meningkatkan Pengelolaan Lumbung Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	25 kelompok lumbung pangan
2.	Membantu pelaporan pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah laporan pengelolaan cadangan pangan	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

(Drs. Yespi Nawiarsih)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, Maret 2024
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(HENDRA SYAFUTRA, S.Pi.)
NIP. 19810216 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSI NORA MAI LIZA, S.IP**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19721108 200701 2 006

ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu melaksanakan penyelesaian administrasi Distribusi Pangan	Jumlah Kelengkapan Administrasi yang dihasilkan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya pelaporan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah laporan pengelolaan cadangan pangan	1 Dokumen

Painan, Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(Drs. Yespi Nawiarsih)
NIP.19681017 198903 1 003

(ROSI NORA MAMLIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2024**

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan I melalui 4 (empat) sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Pada sasaran ini nilai indikator berupa Nilai AKIP dengan target A (81,5).
Program pendukung sasaran ini terdiri dari :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan realisasi kegiatan sebesar 29,92 % atau Rp. 1.532.419.283,- dari Anggaran Rp. 5.122.275.538,-
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.
Pada sasaran ini memiliki indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Dalam menentukan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan jumlah skor PPH dibagi jumlah Skor PPH Maksimum dikali 100 %. Skor PPH dihitung dan didapat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun berikutnya. Dan untuk saat ini data tersebut belum dikeluarkan oleh BPS dan biasanya akan ada bulan mei, jadi pencapaian skor PPH baru bisa disampaikan pada triwulan II.
Program pendukung sasaran ini terdiri dari :
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Realisasi capaian program sebesar 4,32 % atau Rp. 13.526.400,- dari anggaran Rp. 313.395.910,-
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Realisasi capaian program sebesar 22,16 % atau Rp. 13.885.000,- dari anggaran Rp. 62.514.900,-
4. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan.
Pada Sasaran ini memiliki indikator Jumlah Produksi Perikanan dengan Realisasi kinerja pada triwulan I Jumlah Produksi Perikanan adalah 16.907,98 Ton atau 33,35 % dari target tahun 2024. Disamping itu sasaran ini juga didukung oleh Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan target tahun ini sebesar Rp. 86.035.000.000,-, Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai Hasil Perikanan yang diperoleh dari perbedaan harga jual dengan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya dari kegiatan

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penanganan ikan, pengolahan ikan, dan distribusi dalam suatu proses produksi. Pada triwulan I tahun 2024 Nilai tambah produk hasil perikanan dengan realisasi sebesar Rp. 20.741.227.500 atau 24,11 % dari target tahun 2024, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19.753.550.000,- adanya peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan karena meningkatnya permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku produk hasil perikanan,

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

a. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi capaian program sebesar 0,68 % atau Rp. 30.243.751,- dari anggaran Rp. 4.475.288.407,-

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi capaian program sebesar 8,09 % atau Rp. 30.248.500,- dari anggaran Rp. 374.116.084,-

c. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 20,54 % atau Rp. 8.810.000,- dari anggaran Rp. 42.889.550,-

RENCANA AKSI

[illegible]

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2024**

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan II melalui 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Pada sasaran ini nilai indikator berupa Nilai AKIP dengan target A (81,5).

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan realisasi kegiatan sebesar 29,92% atau Rp. 1.532.419.283,- dari Anggaran Rp. 5.122.275.538,-

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah Dinas Perikanan dan Pangan mengusulkan inovasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yaitu suatu inovasi yang bertujuan mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan khususnya dalam pencegahan stunting.

pada tahun 2024 kegiatan inovasi gemarikan dilakukan pada 2 lokasi yaitu : Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera . adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting .

Progres inovasi gemarikan saat ini dalam tahap pengumpulan data dan proses penginputan pada aplikasi

<https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/>

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

- a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 53,64% atau Rp. 23.006.000,- dari anggaran Rp. 42.889.550,-

3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

Pada sasaran ini memiliki indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Dalam menentukan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan jumlah skor PPH dibagi jumlah Skor PPH Maksimum dikali 100%.

Skor PPH dihitung dan didapat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun berikutnya. Dan untuk saat ini data tersebut belum dikeluarkan oleh Susenas.

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Realisasi capaian program sebesar 8,80% atau Rp. 27.580.250,- dari anggaran Rp. 313.395.910,-

- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Realisasi capaian program sebesar 36,12 % atau Rp. 22.580.000,- dari anggaran Rp. 62.514.900,-

4. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan.

Pada Sasaran ini memiliki indikator Jumlah Produksi Perikanan, yaitu untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Realisasi kinerja pada triwulan II Jumlah produksi perikanan Budidaya 3.645,88 ton dan Produksi perikanan tangkap 23.985,17 ton, sehingga total produksi perikanan pada triwulan II adalah sebesar 27.631,05 ton atau 54,51% dari target 2024.

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi capaian program sebesar 1,44% atau Rp. 64.501.251,- dari anggaran Rp. 4.475.288.407,-

- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi capaian program sebesar 16,59% atau Rp. 62.062.000,- dari anggaran Rp. 374.116.084,-

- c. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 53,64% atau Rp. 23.006.000,- dari anggaran Rp. 42.889.550,-

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

s	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)	81,46	99,95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.122.275.538	2.577.300.976	50,32
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	0	0				
3.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,00	0	0	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	313.395.910	27.580.250	8,80
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	50.694	27.631,05	54,51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	22.580.000	36,12
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.475.288.407	64.501.251	1,44
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.116.084	62.062.000	16,59
						Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	42.889.550	23.006.000	53,64
Total							10.390.480.389	2.777.030.477	26,73

Painan, 2 Juli 2024

Kepala Dinas



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2024**

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan III melalui 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Pada sasaran ini nilai indikator berupa Nilai AKIP dengan target A (81,5).

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan realisasi kegiatan sebesar 71,93% atau Rp. 3.684.487.116,- dari Anggaran Rp. 5.122.275.538,-

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah Dinas Perikanan dan Pangan mengusulkan inovasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yaitu suatu inovasi yang bertujuan mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan khususnya dalam pencegahan stunting.

pada tahun 2024 kegiatan inovasi gemarikan dilakukan pada 2 lokasi yaitu : Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera . adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting .

inovasi gemarikan dengan nilai kematangan 93 yang artinya telah mendekati target dengan nilai kematangan 100 pada tahun 2024.

pengumpulan data dan proses penginputan pada aplikasi <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/>

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

- a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 89,30% atau Rp. 38.301.350,- dari anggaran Rp. 42.889.550,-.

3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

Pada sasaran ini memiliki indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Dalam menentukan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan jumlah skor PPH dibagi jumlah Skor PPH Maksimum dikali 100%. Skor PPH dihitung dan didapat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun berikutnya. Dan untuk saat ini data tersebut belum dikeluarkan oleh Susenas.

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Realisasi capaian program sebesar 16,99% atau Rp. 53.252.200,- dari anggaran Rp. 313.395.910,-

Progress kegiatan yang belum terlaksana adalah rehab bangunan Penggilingan Padi Kecil (PPK) dan dalam proses SK penetapan kelompok penerima, karena Lokasi PPK kelompok sebelumnya tidak bisa dibangun akibat banjir bulan maret 2024, dan administrasi keuangan dan fisik sedang dalam proses.

- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Realisasi capaian program sebesar 59,92 % atau Rp. 37.460.000,- dari anggaran Rp. 62.514.900,-.

Progress kegiatan telah sesuai target, untuk pembuatan peta di realisasikan pada akhir tahun atau triwulan IV.

4. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan.

Pada Sasaran ini memiliki indikator Jumlah Produksi Perikanan, yaitu untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Realisasi kinerja pada triwulan III Jumlah produksi perikanan Budidaya 10.868,44 ton dan Produksi perikanan tangkap 35.783,06 ton, sehingga total produksi perikanan pada triwulan III adalah sebesar 46,651,50 ton atau 92,03% dari target 50,694 ton tahun 2024.

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi capaian program sebesar 9,53% atau Rp. 426.351.061,- dari anggaran Rp. 4.475.288.407,-

Progress kegiatan hibah sudah dilaksanakan 100 persen dan telah dibagikan ke kelompok penerima, untuk pencairan keuangan sedang dalam proses.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi capaian program sebesar 70,10% atau Rp. 262.245.975,- dari anggaran Rp. 374.116.084,-

Progress kegiatan tinggal 1 (satu) paket yang dalam proses penyelesaian petak kolam dan administrasi keuangan.

c. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 89,30% atau Rp. 38.301.350,- dari anggaran Rp. 42.889.550,-.

Progres kegiatan untuk triwulan III telah melebihi target, dan tinggal pelaksanaan lomba forikan dan koordinasi Harkanas tahun 2024.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

s	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)	81,46	99,95	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.122.275.538	3.684.487.116	71,93
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93				
3.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,00	0	0	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	313.395.910	53.252.200	16,99
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	50.694	4.6651,5	92,03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	37.460.000	59,92
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.475.288.407	426.351.061	9,53
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.116.084	262.245.975	70,10
						Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	42.889.550	38.301.350	89,30
Total					71,24		10.390.480.389	4.502.097.702	43,33

Painan, 3 Oktober 2024
Kepala Dinas



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2024**

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan III melalui 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Pada sasaran ini nilai indikator berupa Nilai AKIP dengan target A (81,5).

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan realisasi kegiatan sebesar 92,87% atau Rp. 5.049.607.393,- dari Anggaran Rp. 5.437.042.978,-

Progres kegiatan yang menunjang operasional rutin kantor, terlaksana dengan baik fisik dan keuangannya.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah Dinas Perikanan dan Pangan mengusulkan inovasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yaitu suatu inovasi yang bertujuan mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan khususnya dalam pencegahan stunting.

pada tahun 2024 kegiatan inovasi gemarikan dilakukan pada 2 lokasi yaitu : Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera . adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting .

inovasi gemarikan dengan nilai kematangan 93 yang artinya telah mendekati target dengan nilai kematangan 100 pada tahun 2024.

pengumpulan data dan proses penginputan pada aplikasi <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/>

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut:

- a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 99,74% atau Rp. 62.726.100,- dari anggaran Rp. 62.889.550,-.

3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

Pada sasaran ini memiliki indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Dalam menentukan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan jumlah skor PPH dibagi jumlah Skor PPH Maksimum dikali 100%. Skor PPH dihitung dan didapat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun berikutnya. Dan tahun ini Skor PPH 88,1 atau meningkat 1,26 % dari target tahun 2024 yaitu 87.

Program pendukung sasaran ini terdiri dari :

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Realisasi capaian program sebesar 88,98 % atau Rp. 498.994.504,- dari anggaran Rp. 560.793.415,- dengan fisik terlaksana 100 %.

Kegiatan terlaksana sesuai dengan target dan tidak ada hambatan. 1) hibah rehab bangunan Penggilingan Padi Kecil (PPK) telah selesai dan diserahterimakan ke kelompok penerima 2) terlaksannya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15 Ton.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Realisasi capaian program sebesar 85,96 % atau Rp. 53.735.350,- dari anggaran Rp. 62.514.900,-.

Progres kegiatan telah sesuai target, secara fisik semua telah dilaksanakan dengan baik.

4. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan.

Pada Sasaran ini memiliki indikator Jumlah Produksi Perikanan, yaitu untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV Jumlah produksi perikanan Budidaya 14.608,00 ton dan Produksi perikanan tangkap 46.334,68 ton, sehingga total produksi perikanan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 60,942,68 ton atau 103,61% dari target 50,694 ton tahun 2024.

Realisasi kinerja didukung program sebagai berikut :

a. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi capaian program sebesar 96,24% atau Rp. 4.403.263.143,- dari anggaran Rp. 4.475.288.307,-

Progress kegiatan hibah sudah dilaksanakan 100 persen yang terdiri dari mesin 15 PK sebanyak 91 unit, Mesin 40 PK sebanyak 34 unit, Mesin Longtail 6,5 PK sebanyak 24 unit, jaring tramellnet sebanyak 63 unit dan coolbox 300 liter sebanyak 13 unit, semuanya telah dibagikan ke kelompok penerima. Pelaksana Sosialisasi peningkatan kapasitas nelayan kecil dengan tema "Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil" yang diadakan di Hotel Triza Painan. Kegiatan ini diikuti oleh 70 (tujuh puluh) peserta yang berprofesi sebagai Nelayan dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Pesisir.

Progress penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan adalah 1) Menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan. 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, termasuk nelayan, dalam memanfaatkan data sebagai alat perencanaan dan evaluasi. 3) Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data di tingkat daerah maupun nasional. dalam penyediaan data ada beberapa aspek utama : pengumpulan data statistic perikanan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan, pengembangan sistem informasi perikanan dan pendekatan partisipatif.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi capaian program sebesar 98,81% atau Rp. 369.651.825,- dari anggaran Rp. 374.115.974,-.

Progres kegiatan pengadaan benih dan kolam selesai 100 % yaitu : 1 paket benih ikan gurami dan pakan, 1 paket benih ikan lele dan pakan dan 1 paket pembuatan kolam.terlaksananya operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga.

c. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Realisasi capaian program sebesar 99,74% atau Rp. 62.726.100,- dari anggaran Rp. 62.889.550,-.

Progres kegiatan telah terlaksana dan tercapainya target kegiatan yaitu : 1) penyebaran informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi Kesehatan, kekuatan dan kecerdasan melalui berbagai promosi safari gemarikan, pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan (PMTAS). 2) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) setiap tahunnya, tahun 2024 ini AKI Kabupaten Pesisir Selatan adalah 47,84 kg/kapita/tahun. 3) Melaksanakan sosialisasi gemarikan dalam rangka pencegahan stunting pada beberapa kecamatan yang dibuka oleh ketua Forikan Kabupaten Pesisir Selatan. 4) mengikuti Rakor Forikan Propinsi Sumatera Barat dan peringatan Hari ikan Nasional (Harkanas) ke 11 tahun 2024 di Jakarta. 5) meningkatnya produksi dan variasi produk olahan ikan. 6) menjamin keamanan mutu produk hasil olahan perikanan dalam rangka pengurusan sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). 7) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada Poklamsar.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)	81,46	99,95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93				
3.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,00	88,1	101,26	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415	498.994.504	88,98
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694	60.942,68	120,22	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	53.735.350	85,96
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.115.974	369.651.825	98,81
						Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	62.889.550	62.726.100	99,74
Total							11.072.645.124	10.437.978.315	94,27



 Palembang, 30 Desember 2024
 Kepala Dinas
 Firdaus S.P. M.Si
 NIP. 197060621199303 1 008



**RENCANA AKSI TRI WULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan dan Pangan
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]



RENCANA AKSI TRI WULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN				KEGIATAN																																																																																															
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				Program	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	ANGKARAN (Rp.)	BENCANA ASISI	BENCANA												REALISASI												PANGGUNG JAWAB																																																														
			TR I	TR II	TR III	TR IV							TRIMULAN I	TRIMULAN II	TRIMULAN III	TRIMULAN IV	TRIMULAN I	TRIMULAN II	TRIMULAN III	TRIMULAN IV																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	3																																																																



**RENCANA AKSI TRI WULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

RENCANA AKSI TRIWULAN IV
DAERAH : Dinas Perikanan dan Pangan
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN					KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARJET INDIKATOR KINERJA	Program	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARJET INDIKATOR	ANGGABAN (Rp.)	BENCANA ASLI	BENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										TRIVULAN I				TRIVULAN II				TRIVULAN III				TRIVULAN IV				TRIVULAN I				TRIVULAN II					TRIVULAN III				TRIVULAN IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon : (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924
Laman <http://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos- el dpp@pesisirselatankab.go.id

Painan, 29 April 2024

Nomor : 000.6.5.1/8/DPP/2024
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan RTP
Dinas Perikanan dan Pangan Kab.
Pesisir Selatan Tahun 2024 dan 2025

Kepada,
Yth. Seluruh KPA dan PPTK
Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.
di
Painan

Bersama surat ini di undang seluruh KPA dan PPTK Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa/30 April 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara : Rapat Pembahasan RTP Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024 dan 2025.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya terima kasih.

Kenala Dinas



FIRDAUS, S.Pi
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700621 199302 1 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2024
Acara : Pembahasan RTP Omar Penknanan dan pangan kab. Pessel Th 2024 dan 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Yan	sec PPP	2
3	Arrian juba	Kabid. Pembinaan Nelaya	3
4	Henri Kusbawati	Kabid BO	4
5	Riri Loufa	Kabid KPP	5
6	Aspartuti	HL. AKP Muda	6
7	Ermi Rahmasari	AKPD	7
8	Ren Susanti	Perencana	8
9	Yuliasyarn	P3T	9
10	Fitam Sari Tanjung	staf KPP	10
11	Aswita	JFT AKP	11
12	Yulia Novita	AKP	12
13	ROZALINA ALDA	ALCP	13
14	Maria Dyantri	JFT P3T	14
15	ELKE Masrizi	umPEG	15
16	Silvina Graurta	JFT P3T	16
17	Amanah Haezul Azli	staf	17
18	Lezia Yolanda	staf	18
19	Randi Fitriadi	staf	19
20	NOVIA ELISA -w	staf	20
21	YERMANI		21
22	AZWIZAL RINOFA	staf	22
23	Mike Dahria	staf	23
24	ANITA FITRI Zuly	staf	24
25	Syamsuardi	staf	25

Painan, 2024

PPTK

RENI SUSANTI, S.PI, M.Si
NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

- Hari : Selasa
- Tanggal : 30 April 2024
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pukul : 08.30 WIB - Selesai
- Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
- Materi : 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024.
2. Pembahasan RTP tahun 2024
- Hasil :
1. Capaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I baru mencapai 15,68 % yang seharusnya sudah 25%. Hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan Dinas Perikanan dan pangan dilaksanakan pada Triwulan II dan III sesuai Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang dibuat oleh masing-masing PPTK dan KPA. Seperti kegiatan dari dana Pokir masih dalam proses tender dan verifikasi kelompok penerima oleh bidang yang menangani.
 2. Realisasi kinerja triwulan I sesuai sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari empat sasaran yaitu :
 - a. Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan 81,46 (A) dari target 81,5 (A) atau dengan capaian 99,95%.
 - b. Untuk Nilai kematangan Inovasi masih dalam proses penilaian
 - c. Pencapaian Skorpola Pangan Harapan (PPH) belum tersedia, dalam masih dalam proses menunggu data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS.
 - d. Target Produksi Perikanan tahun 2024 adalah 56.694 ton, yang terdiri dari Perikanan Budidaya 14.608 ton dan Perikanan Tangkap 36.085 ton.
Dengan realisasi pada triwulan I 16.907 ton atau 33,35% dari

target, yang terdiri dari :

- a. Perikanan Tangkap 13.353 ton
- b. Perikanan Budidaya 3.554,98 ton

- 3. Perlunya meningkatkan upaya pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara merancang dan merencanakan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila ada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja, bisa dilakukan efisiensi kegiatan yang anggarannya dapat dipergunakan untuk pencapaian target kinerja yang masih rendah.
- 4. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 5. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memperhatikan kembali rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada dokumen Kerangka Acuan Kerja ((KAK) dan Petunjuk Operasional Tahun 2024.
- 6. Seluruh Bidang menyiapkan Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) tahun 2024 yang akan dijadikan RTP Dinas Perikanan dan Pangan.
- 7. Inovasi tahun 2024 dengan tema Gemarikan dan akan menjadi inovasi berlanjut tahun 2024. Agar Bidang KKP menyiapkan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan untuk inovasi tersebut.

NOTULEN,



RENI SUSANTI, S.Pi.,M.Si

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
MONEV SAMPAI TRIWULAN I
SELASA, 30 APRIL 2024
RUANG RAPAT KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**







PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon : (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924
Laman <http://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

Painan, 29 April 2024

Nomor : 000.6.5.1/8/DPP/2024
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan RTP
Dinas Perikanan dan Pangan Kab.
Pesisir Selatan Tahun 2024 dan 2025

Kepada,
Yth. Seluruh KPA dan PPTK
Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.
di
Painan

Bersama surat ini di undang seluruh KPA dan PPTK Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa/30 April 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara : Rapat Pembahasan RTP Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024 dan 2025.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya terima kasih.

Kenala Dinas



FIRDAUS, S.Pi
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700621 199302 1 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 30 April 2024
 Acara : Pembahasan RTP Dinas Pendidikan dan Pangan kab. Pesisir Th 2024 dan 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Yani	PPPP	2
3	Apriman juba	Kabid. Pambinaan nelayan	3
4	Henri Kambur	Kabid B0	4
5	Rini Lovita	Kabid KPP	5
6	Aspituti	HK. AKP Muda	6
7	Ermi Rahmasari	AKPD	7
8	Reny Susanti	Perencana	8
9	Yuliasyam	P3T	9
10	Fitrah Sari Tanjung	staf KPP	10
11	Aswita	JFT AKP	11
12	Yulia Novita	AKP	12
13	ROZALINA ALDA	AKP	13
14	Maria Desyanti	JFT P3T	14
15	Elke Masrizi	umpeg	15
16	Silvina Graub	JFT P3T	16
17	Amanah Hareah Azli	staf	17
18	Lezia Yolanda	staf	18
19	Randi Fitriadi	staf	19
20	Moua Elsa -w	staf	20
21	Yermami		21
22	AZWIZAL RINDA	staf	22
23	Mike Dahra	staf	23
24	AYATA FITRI JULY	staf	24
25	Syamsuwardi	staf	25

Painan,

2024

PPTK

RENI SUSANTI, S.PI, M.Si

NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

- Hari : Selasa
- Tanggal : 30 April 2024
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pukul : 08.30 WIB - Selesai
- Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
- Materi : 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024.
2. Pembahasan RTP tahun 2024
- Hasil :
1. Capaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I baru mencapai 15,68 % yang seharusnya sudah 25%. Hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan Dinas Perikanan dan pangan dilaksanakan pada Triwulan II dan III sesuai Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang dibuat oleh masing-masing PPTK dan KPA. Seperti kegiatan dari dana Pokir masih dalam proses tender dan verifikasi kelompok penerima oleh bidang yang menangani.
 2. Realisasi kinerja triwulan I sesuai sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari empat sasaran yaitu :
 - a. Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan 81,46 (A) dari target 81,5 (A) atau dengan capaian 99,95%.
 - b. Untuk Nilai kematangan Inovasi masih dalam proses penilaian
 - c. Pencapaian Skorpola Pangan Harapan (PPH) belum tersedia, dalam masih dalam proses menunggu data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS.
 - d. Target Produksi Perikanan tahun 2024 adalah 56.694 ton, yang terdiri dari Perikanan Budidaya 14.608 ton dan Perikanan Tangkap 36.085 ton.
Dengan realisasi pada triwulan I 16.907 ton atau 33,35% dari

target, yang terdiri dari :

- a. Perikanan Tangkap 13.353 ton
- b. Perikanan Budidaya 3.554,98 ton

- 3. Perlunya meningkatkan upaya pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara merancang dan merencanakan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila ada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja, bisa dilakukan efisiensi kegiatan yang anggarannya dapat dipergunakan untuk pencapaian target kinerja yang masih rendah.
- 4. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 5. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memperhatikan kembali rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada dokumen Kerangka Acuan Kerja ((KAK) dan Petunjuk Operasional Tahun 2024.
- 6. Seluruh Bidang menyiapkan Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) tahun 2024 yang akan dijadikan RTP Dinas Perikanan dan Pangan.
- 7. Inovasi tahun 2024 dengan tema Gemarikan dan akan menjadi inovasi berlanjut tahun 2024. Agar Bidang KKP menyiapkan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan untuk inovasi tersebut.

NOTULEN,


RENI SUSANTI, S.PI.,M.Si

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
MONEV SAMPAI TRIWULAN I
SELASA, 30 APRIL 2024
RUANG RAPAT KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**







PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan

Painan, 25 Juni 2024

Nomor : 523 / 463 / DPP-PS/2024
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kepala Bidang,
JFT dan JFU
Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pessel.
di
Tempat

Bersama surat ini di undang seluruh Kepala Bidang, JFT dan JFU Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara : Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).

Demikian disampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas


FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199302 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Arsip

Hari : Rabu
 Tanggal : 26 Juni 2024
 Acara : Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fir dani		1
2	Yv. n		2
3	Afriman Julia	Kabid. PN	3
4	Harri Susi Oat	Kabid. BP	4
5	Riri Lovita	Kabid. KFP	5
6	Revi Susanti	Perencana	6
7	Yerpi N		7
8	Aspatuti	AKP	8
9	Gusti Ayu Wulandari		9
10	Ritani Sari Tanjung		10
11	Ermi Rahma Sari	JFT AKPD	11
12	Randi Fitradi	Staf	12
13	Syamsuardi	Staf	13
14	EDA Putri Santi		14
15	MAYA FIKRI Zul		15
16	Nuvia Elsa Wulandari	Staf	16
17	Mike Dahnica	"	17
18	Cessy Nur Annisa	"	18
19	Rahayu Eka Putri	"	19
20	AERIA Sisnawati	"	20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Painan,

2024

PPTK

(Signature)

RENI SUSANTI, S.PI, M.Si

NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Materi : 1. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan.

- Hasil :
- 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang bermanfaat untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
 - 2. Terkait hal itu, maka dilakukan penyiapan dokumen dan penginputan dokumen E-sakip ke aplikasi yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SAKIP yang efektif dan sukses pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3. Pentingnya pengumpulan data yang berkualitas guna mendapatkan hasil evaluasi yang obyektif dan mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja instansi pemerintah. Progres Pencapaian Kinerja Bidang tergambar tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Tingkatan Sasaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Taktikal (Eselon III)	67%
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Taktikal (Eselon III)	54%
Meningkatnya Diversifikasi Ketahanan Masyarakat dan Pangan	Konsumsi energi Konsumsi protein Persentase Ketersediaan Energi	Taktikal (Eselon III)	Data Belum tersedia

	Persentase Ketersediaan Protein Persentase Konsumsi Energi Persentase Konsumsi Protein		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagari rawan pangan	Taktikal (Eselon III)	Data belum tersedia
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan	Taktikal (Eselon III)	Data belum tersedia

Beberapa Indikator Taktikal pada capaian tersebut belum dapat dihitung. Lah ini disebabkan oleh data tersebut merupakan data tahunan. Diharapkan bidang yang mengampu capaian tersebut dapat mengawal dan mencapai target yang ditentukan.

4. Kualitas implementasi SAKIP Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 mencapai 81,49 dengan tingkat akuntabilitas “A”.

NOTULEN,

RENI SUSANTI, S.Pi.,M.Si

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
RABU, 26 JUNI 2024
RUANG RAPAT KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
RABU, 26 JUNI 2024
RUANG RAPAT KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan

Painan, 14 Oktober 2024

Nomor : 523.1/1446 /DPP-PS/2024
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kepala Bidang,
JFT dan JFU
Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pessel.
di

Tempat

Bersama surat ini di undang seluruh Kepala Bidang, JFT dan JFU Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/15 Oktober 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara : Rapat Pembahasan RKA Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas
Sekretaris



Yolli Aang Sofria, S,STP, M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Arsip

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Oktober 2024
 Acara : Pembahasan RKA tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yolli Aang sofria	sekretaris	1
2	KARIL	KABID FK P	2
3	Hani Sutawati	KABID BD	3
4	Ermi Dahmasari	JFT KPD.	4
5	Reni Susanti	Perencana	5
6	Aspatuti	AKP	6
7	Desri Laksmiarti	AAK	7
8	ROZALINA ALWA	AKP	8
9	Silvina Granita	JFT PBT	9
10	Juliarsyam	JFT. PBT	10
11	Mammi Tanjung	Staf	11
12	Maria Desyanti	JFT. PBT	12
13	Elka Masrizah	Kmpg	13
14	Hani Kurniawati	Staf	14
15	Randi Fitriadi	Staf	15
16	Dewa Perti Perti	Staf	16
17	Aswita	JFT AKP	17
18	Amanah Hadeul Azli	Staf	18
19	MIKE DAHRIA	Staf	19
20	AFRI SISMOMILA	Staf	20
21	NOVIA ELSA WULAMPARI	Staf	21
22	Cussy Nur Annisa	Staf	22
23			23
24			24
25			25

Painan, 15 - 10 -

2024

PPTK

[Signature]

RENI SUSANTI, S.PI, M.Si
 NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

- Hari : Rabu
- Tanggal : 15 Oktober 2024
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pukul : 09.00 WIB - Selesai
- Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
- Materi : 1. Rapat Pembahasan RKA Tahun 2025
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III
- Hasil :
- Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja (Renja) kedalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan.
 - Pengumpulan data yang berkualitas diperlukan guna mendapatkan hasil evaluasi yang obyektif dan mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja instansi pemerintah. Progres Pencapaian Kinerja Bidang tergambar tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Tingkatan Sasaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Taktikal (Eselon III)	89%
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Taktikal (Eselon III)	80%
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi Konsumsi protein Persentase Ketersediaan Energi Persentase Ketersediaan Protein Persentase	Taktikal (Eselon III)	Data Belum tersedia

	Konsumsi Energi		
	Persentase Konsumsi Protein		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagari rawan pangan	Taktikal (Eselon III)	Data belum tersedia
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan	Taktikal (Eselon III)	Data belum tersedia

Beberapa Indikator Taktikal pada capaian tersebut belum dapat dihitung. Capaian Bidang Urusan Perikanan telah mencapai progress diatas 75%, Sedangkan urusan pangan data yang diperlukan belum tersedia. Hal ini disebabkan oleh data tersebut merupakan data tahunan. Diharapkan bidang yang mengampu capaian tersebut dapat mengawal dan mencapai target yang ditentukan.

NOTULEN,



RENI SUSANTI, S.Pi.,M.Si





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon : (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924
Laman <http://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

Painan, 16 Desember 2024

Nomor : 000/32/DPP/2024
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kepala Bidang,
JFT dan JFU
Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pessel.
di
Tempat

Bersama surat ini di undang seluruh Kepala Bidang, JFT dan JFU Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	: Selasa/ 17 Desember 2024
Pukul	: 09.00 s/d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara	: Rapat Evaluasi RKPD, Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Painan, 16 Desember 2024

Kepala Dinas



FIRDAUS, S.Pi, M.Si

NIP. 19700621 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Arsip

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2024

Acara : Rapat Evaluasi RKP, Capaian Kinerja dan Rencana Aksi
Triwulan IV Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	KASRIL	Kabid RKP	2
3	Henri Susilowati	Kabid BP	3
4	Reni Susanti	Perencana	4
5	Desi Lalmidars	JFT	5
6	Dandi Fitriadi	Staf	6
7	Ukman	Staf	7
8	Elka Masrizk	Subas Unpa	8
9	Hoki Kurniawan	Staf	9
10	Roz Yuniadi	Staf	10
11	Amrah Hadaul Azli	Staf	11
12	Adhik Sunardi	Staf	12
13	Rozalina AUDA	Jf AKP	13
14	Opa Dwi Asisk	Staf	14
15	Samsuardi	Staf	15
16	MAYA RZ	Staf	16
17	Afria Sismovika	staff	17
18	CESY Nur Anniscu.	"	18
19	Mike Dahria	"	19
20	NOVIA ELSA wulandari	staf	20
21	Dewa Restu Ranto		21
22			22
23			23
24			24
25			25

Painan, 17 - 12 -

2024

PPTK



RENI SUSANTI, S.PI, M.Si

NIP. 19750417 200701 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <http://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

Painan, 18 Desember 2024

Nomor : 000/33/DPP/2024
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada,
Yth. Seluruh Kepala Bidang,
JFT dan JFU
Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pessel.
di
Tempat

Bersama surat ini di undang seluruh Kepala Bidang, JFT dan JFU Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 19 Desember 2024
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.
Acara : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Painan, 18 Desember 2024

Kepala Dinas



FIRDAUS, S.Pi, M.Si

NIP. 19700621 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Arsip

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 19 Desember 2024
 Acara : Rapat penyusunan laporan kinerja Tahun 2024.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	KASRI	Ketia FKP	2
3	Hermi Susi Lantoh	ICcbid BP	3
4	Ermi Rahmasari	JFT KOP	4
5	Hoki Kutai AWA	staf	5
6	Randi fhmadi	staf	6
7	LUKMAN	"	7
8	Rozalina ALDA	Jf AKP	8
9	Remi Susanti	Perencana	9
10	Rosi Yusrini	staf	10
11	Elke Mariza	subas Umpos	11
12	MAYA F. z	staf	12
13	Amanah Haddul Axi	staf	13
14	Olga Dwi Asiski	staf	14
15	Adiko Junardi	staf	15
16	Syamsuardi	staf	16
17	cesri Nur Annisa.	"	17
18	NOVIA ELSA WULANDARI	"	18
19	AFRIA SISMONIKA	staf	19
20	Mike Dahnia.	"	20
21	Handro Stafetra	"	21
22	Desri Lalmi Darg	JFT AAK	22
23			23
24			24
25			25

Painan, 19 - 12 - 2024

PPTK

RENI SUSANTI, S.PI, M.Si
 NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Muhammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Hari : Kamis
- Tanggal : 19 Desember 2024
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pukul : 09.00 WIB - Selesai
- Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
- Materi : 1. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Hasil :
1. Masing-masing bidang menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan beserta Dokumentasinya.
 2. Evaluasi kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada masing-masing Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Kepala Bidang (Kabid) yang mendukung sasaran strategi Dinas Perikanan dan Pangan serta Bupati.
 3. Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik program kegiatan Tahun 2024

NOTULEN,

RENI SUSANTI, S.Pi., M.Si

Dokumentasi Rapat





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Pimpinan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Materi : Evaluasi RKPD, Capaian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024.

Hasil :

1. Realisasi Capaian Kinerja ogram dan kegiatan sampai per 17 Desember 2024 adalah Rp. 9.440.231.565,- atau 63 % masih ada sekitar Rp. 5.537.745.994 yang belum teralisasi. Hal ini disebabkan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan terjadi peningkatan pada perubahan anggaran dan sedang dalam proses administrasi.
2. Realisasi kinerja Nilai tambah produk hasil perikanan per oktober 2024 adalah Rp. 62.124.914.000,- atau 72,33 % dari target tahun 2024.
3. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,9 atau naik 108,41 dari target tahun 2024 yaitu 82.
4. Produksi Perikanan sampai oktober 2024 adalah 56.862 ton
5. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memperhatikan kembali rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada dokumen Kerangka Acuan Kerja ((KAK) dan Petunjuk Operasional Tahun 2024.
6. Percepatan pelaksanaan kegiatan yang hanya tinggal 1 minggu hari kerja, agar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

NOTULEN,

RENI SUSANTI, S.Pi.,M.Si

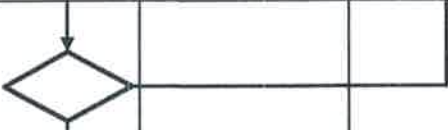
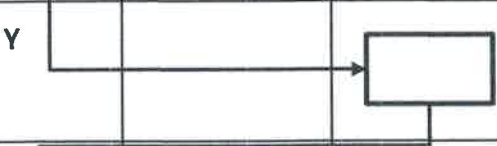
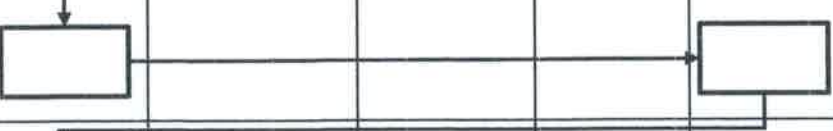
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/ / SOP/ DPP-PS/2024
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	25 Maret 2024
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Slatan  FIRDAUS, S.Pi NIP. 19700621 201903 1 006
	SEKRETARIAT Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan	Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Bidang di lingkup Dinas
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pencarian data dan Informasi 3. SOP Pengarsipan	1. Renja 2. Dokumen Laporan Fisik dan kegiatan 3. Format Indikator kinerja Utama 4. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan monitoring/evaluasi internal capaian kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Disimpan sebagai dokumen penendalian dan evaluasi kinerja

PROSEDUR MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA

1 D

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Perencana	JFT	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Format isian monitoring dan evaluasi kerja						Format Isian	15 Menit	Disposisi	
2	Melakukan pengumpulan data kinerja Bidang per Triwulan						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	2 Hari	Lembar Disposisi	
3	Mengolah data kinerja						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	7 Hari	Jadwal, Format Isian, Laporan Evaluasi Kinerja	
4	Melakukan pemeriksaan data kinerja						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 Hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
5	Menyerahkan draft data kinerja						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	15 Menit	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
6	Menjadwalkan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	15 Menit	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
7	Melaksanakan Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 jam	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
8	Mengevaluasi dan supervisi hasil pengendalian dan evaluasi						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 Jam	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
9	Menyusun draft laporan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	2 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	

10	Melakukan supervisi dan koreksi draft laporan hasil monitoring					Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
11	Menyusun Dokumen monitoring evaluasi kinerja dinas					Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
12	Menerima laporan monitoring dan evaluasi					Laporan Evaluasi Kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
13	Menyimpan dokumen monitoring evaluasi kinerja dinas					Laporan Evaluasi Kinerja	15 Menit	Laporan monitoring evaluasi kinerja	

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621-199303 1 006



20
24



LAPORAN KINERJA

WRITTEN BY :
**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 di sektor Perikanan dan Pangan.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Perikanan dan Pangan baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas tahun anggaran 2024.

Demikian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi sumber informasi masyarakat pada umumnya, terima kasih.



Paiman, Januari 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

FIRDAUS, S.Pi. M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pencatatan kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Bupati Pesisir Selatan yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”**.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 mendukung dan berperan aktif dalam menjalankan misi pertama yaitu ***Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan*** misi kedua yaitu ***Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat*** dan misi ketiga ***Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah***. Untuk mencapai tujuan Dinas Perikanan dan Pangan, ada 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
3. Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

4. Jumlah Produksi Perikanan

Pencapaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada masing - masing misi adalah sebesar 93,10%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *sangat baik* dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,50)	A (81,46)	99,95
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 2 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87,00	88,20	101,37
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah produksi perikanan (ton)	50.694	60.942,68	120,22
	Rata-rata capaian				103,63

Catatan : *) : Angka realisasi Tahun 2024

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dengan pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga dimasa yang akan datang pencapaian sasaran strategis lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTIAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Manusia	13
1.4. Aspek Strategis Organisasi	15
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	17
1.6 Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	20
2.2. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	21
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.1.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.2. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas	28
3.1.3. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	30
3.2. Realisasi Anggran	66
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	13
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024	22
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis, Indikator Utama (IKU dan Program Kegiatan Pendukung Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan..	23
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	25
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	26
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	28
Tabel 3.3.	Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026	29
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	30
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2021- 2024	31
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	31
Tabel 3.7.	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Propinsi dan Nasional Tahun 2024	32
Tabel 3.8.	Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	32
Tabel 3.9	Analisis Kebutuhan Sumberdaya Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	33
Tabel 3.10	Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	33
Tabel 3.11	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024..	37
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	38
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	39

Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	39
Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	40
Tabel 3.16	Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	40
Tabel 3.17	Capaian Tingkat konsumsi Tahun 2024	42
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2023 dan 2024	42
Tabel 3.19	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024.....	43
Tabel 3.20	Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024	45
Tabel 3.21	Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2021,2022, 2023, 2024)	45
Tabel 3.22	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2024	47
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	47
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	47
Tabel 3.25	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	48
Tabel 3.26	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Meningkatnya Ekonomi Masyarakat miskin dan Rentan Miskin	50
Tabel 3.27	Dukungan Kegiatan APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat miskin dan Rentan Miskin	50
Tabel 3.28	Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat miskin dan Rentan Miskin	51
Tabel 3.29	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	59
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2022 s/d 2024	59
Tabel 3.31	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Tahun 2020s/d 2024	60
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	61
Tabel 3.33	Perbandingan Kinerja Indikator Dengan Standar Propinsi dan Nasional Tahun 2024	62
Tabel 3.34	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor unggulan	62
Tabel 3.35	Bantuan Sarana dna Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2022, 2023,2024	63
Tabel 3.36	Data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	63
Tabel 3.37	Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Tahun 2022, 2023,2024	66

Tabel 3.38	Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	67
Tabel 3.39	Produksi Benih Ikan BBI Pincuran Boga Tahun 2024	68
Tabel 3.40	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor unggulan	72
Tabel 3.41	Dukungan Kegiatan APBD untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	72
Tabel 3.42	Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	73
Tabel 3.43	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan	83
Tabel 3.44	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	13
Grafik 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Grafik 1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Grafik 1.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tujuan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024

atas dasar kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh

Kepala Dinas pejabat Eselon II.b. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksanana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
2. Pelaksanana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
3. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

2. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
5. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
6. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
8. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
9. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
11. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
12. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
13. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
14. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
15. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan

menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;

16. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- (a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pembenihan dan pembesaran ikan.

- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada nelayan.

(b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

(c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

- (a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Ketersediaan Pangan.
- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengoordinasikan, dan evaluasi Distribusi Pangan.
- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. pengkajian konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
3. pelaksanaan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
4. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
5. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.

- (b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

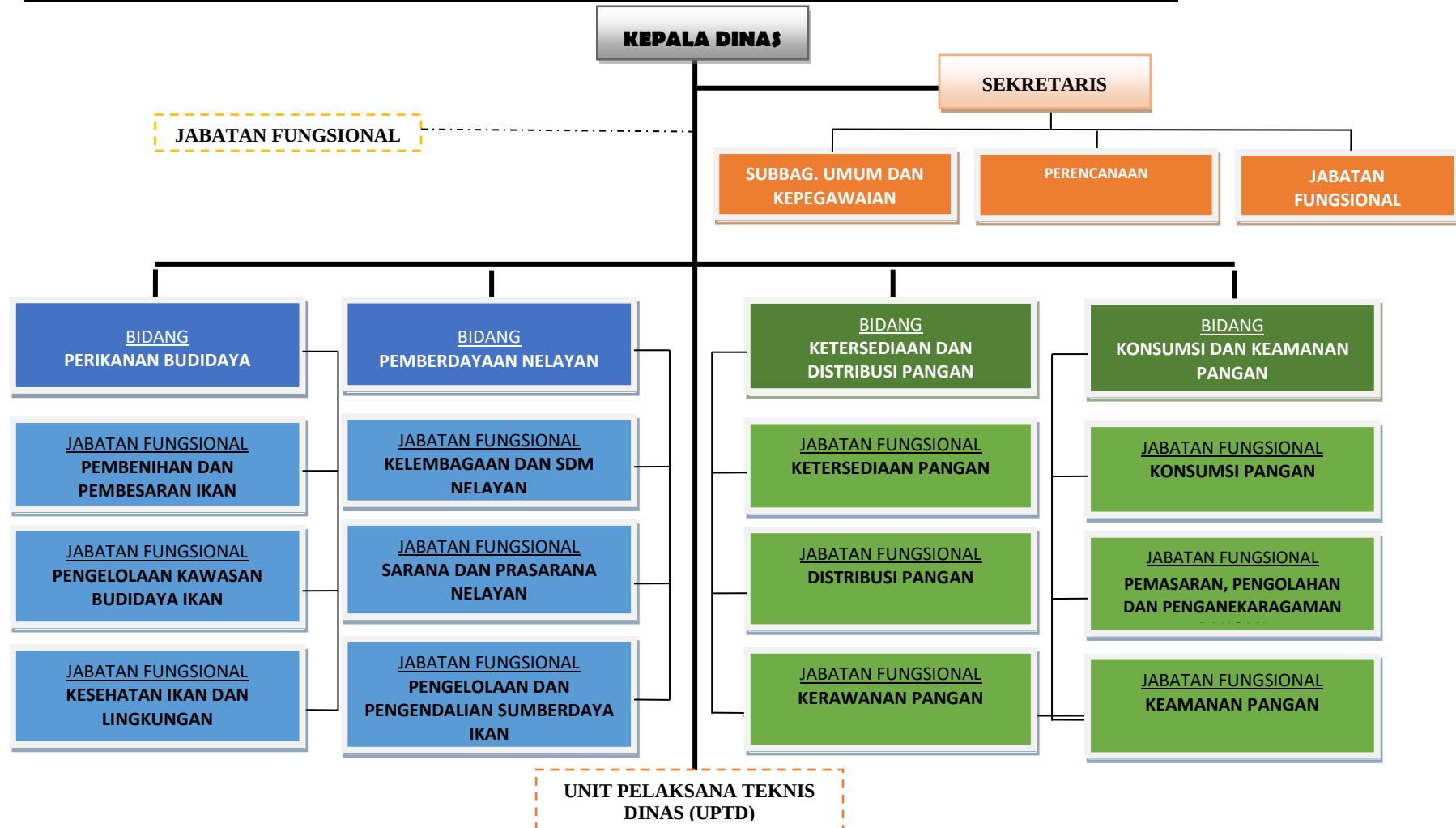
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

- (c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 166 Tahun 2021)



1.3.4 Sumber Daya Manusia

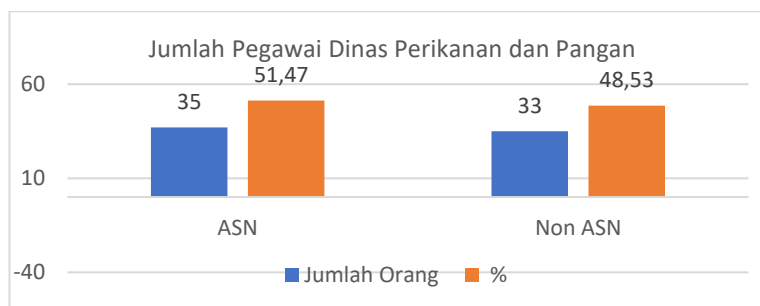
Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024, sebanyak 68 orang, terdiri dari 35 orang ASN dan 33 orang Tenaga Honorer (Non ASN), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	35	51,47
2.	Non ASN	33	48,53
Jumlah		68	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.1
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023



Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 51,47 % ASN dan 48,61% Non ASN.

Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

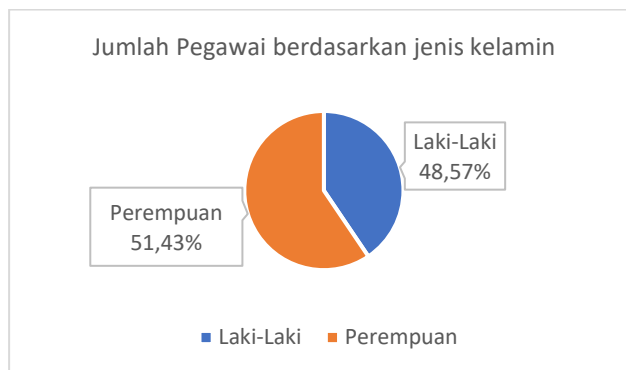
Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	17	48,57
2.	Perempuan	18	51,43
Jumlah		35	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Keadaan pegawai berdasarkan golongan

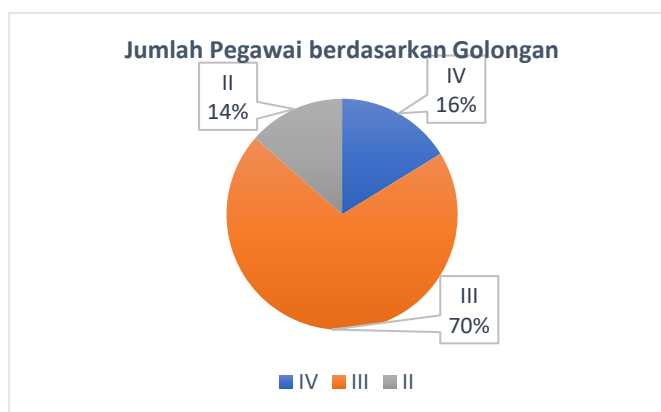
Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	6	16,22
2.	III	26	70,27
3.	II	5	13,51
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan IV sebanyak 6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%.

c. Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan

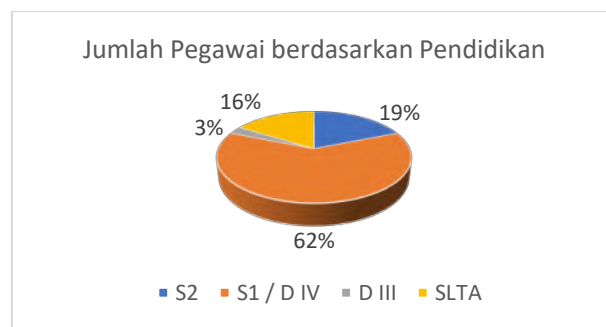
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	23	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	6	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan dan Pangan, mengisi pembangunan Perikanan dan Pangan dengan menyelaraskan dan menjalankan

misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”***. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung agenda Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang kedua dan ketiga yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Masyarakat

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi pemutakhiran Program dan Kegiatan, sehingga Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui 8 (delapan) program adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 8) Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan

1. Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tataruang dan wilayah.
2. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kualitas kelembagaan usaha.
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar.
5. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
7. Rendahnya daya saing pengolah dan pemasar hasil perikanan
8. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.
2. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah. Gejolak harga dan pasokan pangan sampai saat ini

masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan, hal ini dapat menyebabkan keresahan sosial dan inflasi. Intervensi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh produsen dan konsumen (masyarakat) untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis seperti cabe, bawang merah, bawang putih, jengkol dan komoditi lainnya.

3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal.

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2024 dan dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Adapun susunan sistematika penyajiannya sebagai berikut :

Bab I Pada Bab ini menyajikan gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur organisasi dan Sumberdaya manusia. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini menyajikan penjelasan secara ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2024. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

V I S I

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”

Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);

Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi kedua dan ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat dan Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.2 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,5)
2.			Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87
4.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694

Sumber : Perencanaan Tahjun 2024

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menjabarkan dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan sesuai periode Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A (81)	A (81,5)	A (82)	A (82,5)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi tahun (n)			53.945	50.694	51.604	52.553

Sumber : Perencanaan Tahjun 2024

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program

dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perikanan dan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kegiatan Pendukung Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran/Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kaupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2024
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,5)
2		Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	87
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694

2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : FIRDAUS, S.Pi Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Jabatan : Bupati Pesisir Selatan Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Paman, 22 Januari 2024 PIHAK KEDUA BUPATI PESIR SELATAN (Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd) PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (FIRDAUS, S.Pi) NIP. 199303 1 006			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKUP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Efisiensi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,0
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Jumlah Produksi Perikanan	50.694
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN			
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Perkembangan Perikanan Air Tawar	Rp 5.122.275.510	-
2	Pengelolaan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 313.395.936	-
3	Pengembangan Perikanan Air Tawar	Rp 62.514.900	-
4	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 4.475.288.407	-
5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 374.116.004	-
6	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 42.889.550	-
Jumlah	Rp	10.390.480.389	-
Paman, 22 Januari 2024 PIHAK KEDUA Bupati Pesisir Selatan (Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd) PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (FIRDAUS, S.Pi) NIP. 199303 1 006			

Untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan melaksanakan 6 program dengan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.072.645.124,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Tahun 2024
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.437.042.978
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.575.288.307
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.115.974
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	62.889.550
	Jumlah	11.072.645.124

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan skala pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,50)	A (81,46)	99,95
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 2 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87,00	88,20	101,37
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah produksi perikanan (ton)	50.694	60.942,68	120,22
	Rata-rata capaian				103,63

Catatan : *) : Angka realisasi Tahun 2024

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa ke 4 (empat) indikator yang ditetapkan tahun 2024 terlihat rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 81,46 (A) dari target 81,50 (A) atau dengan predikat “ baik”.
- 2) Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,20 dari target yang ditetapkan 87 atau dengan capaian 101,37 % atau dengan capaian “sangat baik”. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
- 3) Jumlah Produksi Perikanan dengan realisasi 50.694 dari target 60.942,68 dengan capaian 120,22 %, dengan predikat “sangat baik”.
- 4) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 93 dari target nilai 100 atau dengan predikat “baik”.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 103,63% atau melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan pencapaian ini termasuk kategori “ sangat baik”

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 6 (enam) program pendukung dengan realisaswi seperti tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Program	APBD Tahun 2024 (Rp)	APBD Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.122.275.538	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	387.435.585
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	313.395.910	560.793.415	498.994.504	88,98	61.798.911
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	62.514.900	53.735.350	85,96	8.779.550
4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.475.288.407	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24	172.025.164
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.116.084	374.115.974	369.651.825	98,81	4.464.149
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42.889.550	62.889.550	62.726.100	99,74	163.450
	Jumlah	10.390.480.389	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27	634.666.809

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian tersebut, menunjukkan kesungguhan dan komitmen Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang peikanan dan pangan tahun 2024.

3.1.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan misi 1, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja 1 dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,50)	A (81,46)	99,95
		Jumlah				99,95

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai A atau 81,46 dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2021 - 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,86)	A (80,97)	A (80,97)	A (81,46)*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,46)	A (82,50)	98,73

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar	Dinas Pangan Prov. Sumbar	Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI	Badan Pangan Nasional
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,46)				-

*Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023*

Sumber : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar

2. Dinas Pamngan Prov. Sumbar

3. Kementerian Kalutan dna Perikanan RI

4. Badan Pangan Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,50)	A (81,46)*	99,95	belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	- Pengelolaan SDM - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja - Struktur Tata Kelola - Budaya dan Hubungan Organisasi

*Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023*

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja *dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah*, diperlukan sumber daya yang memadai,mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.

3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.9
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (20 orang Analis Ketahanan Pangan dan 30 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (9 orang Analis Ketahanan Pangan dan 15 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan dan bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya perbaikan Gedung kantor, penambahan mobile dan peralatan kantor	Optimalisasi penggunaan Sarana dan prasarana yang ada

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 5.437.042.978,- dan terealisasi Rp. 5.049.607.393,- (93,87%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar uraian tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	100,00	387.435.585
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34	100,00	998.966
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34	100,00	998.966
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.504.365.292	4.140.611.767	91,92	100,00	363.753.525
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.945.292	3.937.203.111	91,95	100,00	344.742.181
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.260.000	191.252.336	90,96	100,00	19.007.664

	8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.160.000	12.156.320	99,97	100,00	3.680
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.331.850	404.298.064	97,34	100,00	11.033.786
	10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.860.400	11.848.840	99,90	100,00	11.560
	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.095.090	39.093.965	100,00	100,00	1.125
	12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.332.310	27.573.840	97,32	100,00	758.470
	13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	4.104.000	76,00	100,00	1.296.000
	14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.005.000	3.427.500	68,48	100,00	1.577.500
	15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.553.000	295.449.919	98,63	100,00	4.103.081
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.086.050	22.800.000	87,40	100,00	3.286.050
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.837.418	235.791.614	95,53	100,00	11.045.804
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	101.400.000	91.355.919	90,09	100,00	10.044.081
	18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.437.418	144.435.695	99,31	100,00	1.001.723
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.320.000	209.716.496	99,71	100,00	603.504
	19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.600.000	56.029.704	98,99	100,00	570.296
	20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.700.000	109.686.792	99,99	100,00	13.208
	21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.100.000	22.100.000	100,00	100,00	-
	22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.920.000	21.900.000	99,91	100,00	20.000
		JUMLAH	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	100,00	387.435.585

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 adalah A (81,50), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023 sebesar A (81,46) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,95%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,6 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (80,97).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,97
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,19
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,80
4	Evaluasi Internal	25,00	22,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		81,46
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

- a. melakukan penyesuaian target pada PK untuk target-target yang telah tercapai melebihi target ditahun berikutnya yang telah tertuang dalam realisasi kinerja tahun sebelumnya
- b. melakukan monitoring kinerja atas Rencan Aksi setiap bulan, triwulan dan semester dengan membuat laporan monitoring tentang kriteria :
 1. Capaian target rencana aksi secara periodic dipantau kemajuannya.
 2. Setiap deviasi atas aksi dilaksanakan segera analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
 3. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan nujntuk mengetahui progress kerja terbaru.

2) Pelaporan Kinerja

- a. Data Pembanding Nilai AKIP Perangkat daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Daerah;
- b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Daerah.
- c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja secara memadai

3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja Internal dengan membuat laporan monev dengan menyajikan;
 1. Target Kinerja
 2. Realiasasi Kinerja
 3. Faktor Pendorong
 4. Faktor Penghambat
 5. Rekomendasi

- b. Menjadikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai Perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Kinerja sehingga memberikan dampak efektivitas dengan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ;

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu “Terwujudnya Pemerinthan yang Akuntabel dan Bekinerja” dengan indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan dengan target A (81,50) dengan realisasi A (81,46) dengan pencapaian kinerja 99,95 %.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 telah melaksanakan 1 program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.049.607.393,- atau 92,87 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.437.042.978,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,13%.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93.00	93.00
	Jumlah			93.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa inovasi yang dilakukan oleh bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan makan ikan), pemanfaatan inovasi dalam kegiatan : Sosialisasi Gemarikan di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini terlihat dari data AKI Tahun 2022 (47,38 kg/kapita) meningkat pada Tahun 2023 (47,51 kg/kapita). Penurunan angka Stunting Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2022 (29,8%) dan setelah adanya Inovasi angka stunting pada tahun 2023 (27%). Dari hasil inovasi tersebut nilai kematangan inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah 93.00.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	93.00	93.00
Rata-Rata Capaian						93.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu
Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	63.00	93.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 47,61 % dari 63.00 pada Tahun 2023 menjadi 93,00 pada Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	93.00	100	93.00

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

d. Perbandingan Realisassi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

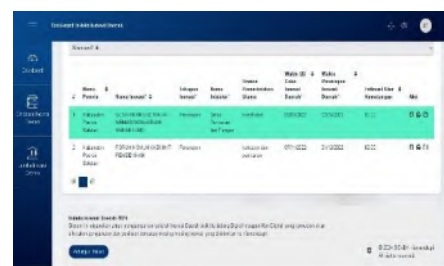
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	93.00	93.00	Dengan adanya inovasi gemarikan semakin meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan penurunan angka stunting	Semakin ditingkatkannya kematangan inovasi untuk tahun berikutnya

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024



f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan pangan tahun 2025 Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini mencakup alokasi penganggaran yang tepat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Penggunaan sumber daya yang efisien berkontribusi pada hasil yang optimal dalam program-program yang dilaksanakan.

Tabel 3.16
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa
			Keuangan	%	Fisik (%)	Anggaran
F	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	62.889.550	62.726.100	99,74	100,00	163.450
16	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26	100,00	50.950
34	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26	100,00	50.950

17	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	56.000.000	55.887.500	99,80	100,00	112.500
35	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	55.887.500	99,80	100,00	112.500
	JUMLAH	62.889.550	62.726.100	99,74	100,00	163.450

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu : Program Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebesar Rp. 62.726.100,- atau 99,74% dari total anggaran sebesar Rp. 62.889.550,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,26%.

Sasaran 3
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH).

Dalam penentuan skor PPH ada indikator yang saling berkaitan atau mempengaruhi yaitu tingkat konsumsi pangan masyarakat.

Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

Formulasi :

Tingkat konsumsi Energi : $\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

b. Konsumsi protein

Formulasi :

Tingkat konsumsi protein : $\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

Pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja tingkat konsumsi tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Tingkat Konsumsi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan :				
	Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.223	2.040	91,77
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	59	57,00	96,61
Rata-rata Capaian					94,19

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat konsumsi energi 2.040 Kkal/kapita/hari terjadi penurunan dari target 2.223 Kkal/kapita/hari pada tahun 2024 dengan capaian 91,77% dan lebih rendah sebesar 2,86 % dari Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan realiasi konsumsi protein 57,00 Gram/kapita/hari terjadi penurunan dari target 59,00 Gram/kapita/hari pada tahun 2024 dengan capaian 96,61%. Namun masih dalam standar Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 57,00 gram/kapita/hari. Artinya konsumsi pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan baik Konsumsi Energi maupun Konsumsi Protein telah memenuhi standar konsumsi pangan Nasional.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Tingkat Konsumsi Pangan
Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan :							
	Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.247	2.115	94,13	2.223	2.040	91,77
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60	57,50	95,83	59	57,00	96,61
Rata-rata Capaian					94,98			94,19

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas beberapa indikator terkait kinerja ketahanan pangan sebagai berikut :

- a. Konsumsi energi tahun 2024 sebesar 2.040 kkal/kap/hari, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (2.115 kkal/kap/hari). Konsumsi energi tersebut juga terjadi penurunan dari standar AKE 2.100 kkal/kap/hari, namun tidak mempengaruhi konsumsi energi kabupaten secara keseluruhan.

- b. Konsumsi protein tahun 2024 sebesar 57,00 gram/kap/hari, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun tahun 2013 (57,50 gram/kap/hari). Meskipun mengalami penurunan, namun sama dengan konsumsi protein penduduk nasional dengan anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari.

Perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.19
Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat konsumsi pangan				
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita /hari)	2.420	2.071	2.115	2.040
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/ hari)	65	54,4	57,5	57,00

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan selama kurun waktu tahun (2021-2024) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi

Berpedoman pada Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/ kapita/hari, secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat disimpulkan telah normal, seperti dilihat dari perkembangan Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 tingkat konsumsi energi sebesar 2.420 kkal/kapita/hari melebihi AKE yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari artinya rata-rata konsumsi energi dan protein pada rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kategori normal yaitu 115,24 % AKE pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat konsumsi energi yaitu menjadi 2.071 kkal/kapita/hari. Pada tahun 2023 sebesar 2.115 kkal/kapita/hari artinya pada terjadi penurunan AKE yaitu 98,62 % AKE tahun 2022 dan Kembali normal 100,71 % AKE tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan konsumsi energi yaitu 2.040 kkal/kapita/hari atau 97,14 % dari standar Nasional, namun hal itu tidak mempengaruhi terhadap konsumsi pangan Masyarakat.

2. Konsumsi protein

Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 57 gram/kapita/hari secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2021 konsumsi protein sebesar 65 gram/kapita/hari. Dan pada tahun 2022 konsumsi protein sebesar 54,4 gram/kapita/hari Konsumsi energi ini lebih rendah dari AKP tapi masih dalam mendekati normal, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan pada supply food dan harga makanan yang meningkat dan tahun 2023 menjadi 57,5 gram/kapita/hari, dan Pada tahun 2024, konsumsi protein kembali menurun menjadi 57,00 gram/kap/hari, yang sama dengan standar nasional artinya pemenuhan protein pada pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah ideal dan beragam bergizi dan seimbang.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu sepanjang waktu untuk dapat hidup sehat dan aktif beraktifitas, mencakup aspek ketersediaan, distribusi, keterjangkauan (fisik dan ekonomi) dan dimensi waktu.

Pada tataran rumah tangga, ketahanan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan baik di Tingkat rumah tangga maupun wilayah dan daya beli. Daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan tergantung dari Tingkat pendapatan dan harga pangan. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung dari jumlah dan produktivitas tenaga kerja, jenis pekerjaan dan Tingkat upah.

Sementara ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga untuk menghasilkan dan membeli pangan yang dibutuhkan. Selain itu karena pengertian ketahanan pangan mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, maka pola atau Tingkat konsumsi penduduk merupakan faktor penentu tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi dan konsumsi protein masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami perubahan-perubahan pada beberapa tahun terakhir, tetapi masih dalam standar nasional.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87	88,2	101,37

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2023

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{88,2}{87} \times 100\% \\
 &= 101,37\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian tingkat konsumsi baik energi maupun protein dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2021,2022, 2023,2024)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022	Skor PPH 2023	Skor PPH 2024
1	Padi-padian	25,0	25,0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	2,5	0,7	0.6	0.8	0.6
3	Pangan Hewani	24,0	18,9	19.5	20.9	21.9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1.0	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	10,0	2,5	4.4	4.9	4.3
7	Gula	2,5	1,8	1.8	1.6	1.6
8	Sayur dan Buah	30,0	25,6	29.6	29.7	28.8
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	80,4	86.9	88.9	88.2

Keterangan: 1) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004);
 2) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018);
 3) Bobot kelompok pangan digunakan untuk penghitungan skor PPH nasional dan regional.
 4) Data diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004.
 5) Skor PPH Regional digunakan sebagai standar/acuan komposisi pangan ideal Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
 6) Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi pangan ideal.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimum PPH, tetapi meningkat dibandingkan 4 tahun terakhir. Untuk kelompok padi-padian cenderung stabil, tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi. Konsumsi pada 4 (empat) kelompok pangan masih rendah, hal ini kemungkinan

disebabkan kebiasaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengkonsumsi, seperti umbi-umbian, karena bukan makanan pokok, kemudian masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap beberapa bahan pangan seperti, pangan hewani dan kacang-kacangan.

Pentingnya keberagaman konsumsi karena konsumsi pangan yang beragam erat kaitannya dengan konsumsi pangan yang berkualitas, sehingga memenuhi angka kecukupan gizi dan energi. Selain itu, keberagaman konsumsi dapat menekan ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu, khususnya komoditas pangan yang masih mengandalkan impor.

Kesembilan kelompok pangan tersebut merepresentasikan 3 kelompok fungsi pangan bagi tubuh, yaitu sebagai sumber karbohidrat atau tenaga (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), sumber protein atau zat pembangun (pangan hewani dan kacang-kacangan), serta sumber vitamin dan mineral atau zat pengatur (sayuran dan buah).

Untuk target skor PPH Nasional mengacu pada RPJMN dan usulan dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk skor PPH Daerah mengacu pada RPJMD, target nasional, dan usulan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, target skor PPH nasional pada tahun 2023 adalah 94,0 dan target 2024 adalah 95,2 dari skor PPH ideal 100. “Diharapkan dengan Perbadan tentang PPH ini dapat dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk juga pengentasan daerah rentan rawan pangan dan gizi serta pengurangan *stunting*. Saat ini yang pasti Pemerintah semakin serius terhadap gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat,”

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indicator pencapaian skor PPH selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87	82	82	87	80,4	86,9	88,9	88,2	92,41	105,97	108,41	101,37

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,2	87	108,41	Dengan semakin beragamnya konsumsi Masyarakat akan meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal.

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

d. Membandingkan Realisassi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Standar Provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Badan Pangan Nasional
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,2	90,5	

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini

Tabel 3.25
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	87	88,2	108,41	Peningkatan skor PPH artinya peningkatan semakin beragamnya konsumsi pangan Masyarakat	gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA) yang akan meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 :

- a) Penganeekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
- b) Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
- c) Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

- a) Keterbatasan Sosialisasi Program peningkatan Pola Pangan Harapan belum merata diterima oleh masyarakat.
- b) Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- c) Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah

penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal.

- d) Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu.
- e) Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.
- f) Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

- a) Meningkatkan promosi/kampanye pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam melaksanakan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Intervensi Kebijakan, telah dilakukan pemberian bantuan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan balita di daerah rawan pangan.
- c) Mempromosikan Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya *menu/snack* yang disediakan adalah pangan lokal.
- d) Meningkatkan pengelolaan jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan *stakeholder* dan *off taker* terkait untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan.
- e) Pengembangan Sumber Daya Manusia pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk Pelatihan maupun Bimbingan Teknis baik dalam bentuk pengolahan pangan lokal, manajemen usaha, kewirausahaan dan strategis bisnis pengolahan pangan lokal.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator kinerja *Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan*, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan

2. Sumber anggaran yang memadai.

Tabel 3.26
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Strategis
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (6 orang Analis Ketahanan Pangan dan 20 orang Penalaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (3 orang Analis Ketahanan Pangan dan 7 orang Penalaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan, Bimbinagn Teknis Pengolahan Pangan Lokal, pelaksanaan Gerakan/Kampanye Pangan B2SA serta bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi nggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis strategis Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan miskin *dengan Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* adalah sebesar Rp. 623.308.315,- dan terealisasi Rp. 552.729.854,- (88,68 %). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,32% dengan uraian tabel di bawah ini

Tabel 3.27
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
B.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415	498.994.504	88,98	100,00	61.798.911
7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
23	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
8	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	235.000.005	197.138.650	83,89	100,00	37.861.355
24	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.112.000	187.387.000	89,18	100,00	22.725.000

	25	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.888.005	9.751.650	39,18	100,00	15.136.355
9		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
	26	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
C		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900	53.735.350	85,96	100,00	8.779.550
10		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
	27	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
11		Kegiatan Penanganan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
	28	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
		JUMLAH	623.308.315	552.729.854	88,68	100,00	8.779.550

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 3. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2024 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.28
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415	498.994.504	88,98
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	53.735.350	85,96
	Jumlah	623.308.315	552.729.854	88,68

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023

Berikut Program yang mendukung capaian sasaran strategis 3 mencakup :

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 560.793.415,- dengan realisasi sebesar Rp. 498.994.504,- atau 88,98 %. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

- I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan,

a) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Pokok Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.999.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 276.097.554,- atau 92.03 %, pada kegiatan ini ada Revitalisasi PPK sebanyak 2 unit yaitu :

- Kelompok Rawang Batu Gadang (II) di Kampung Koto Tangah Merapak, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera
- Kelompok Syariak Dalam di Kampung Rawang, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera

Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil



Monitoring Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil



II. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Kabupaten/Kota
kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan pengadaan cadangan pangan pemerintah berupa beras bekerjasama dengan Bulog, untuk tahun ini pengadaan beras adalah sebanyak 15 Ton. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 210.112.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 187.387.000,- atau 89,18 %.

b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras pada saat adanya kejadian bencana alam. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.888.005,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.751.650,- atau 39,18 %.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah



Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah



III. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menghasilkan keanekaragaman Pangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.793.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.758.300,- atau 99,86 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa :

1. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan ketersediaan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah (KRPL).
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat dalam panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan pengolahan serta konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Melakukan promosi dan pengembangan kreasi dan inovasi tentang pengolahan pangan lokal dan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan Panganekaragaman Pangan lokal melalui fasilitasi bantuan Pengembangan KRPL dana Hibah Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah :

1. Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk pencegahan dan Penurunan Stunting dan Demonstrasi Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada tanggal 24 Juni 2024 di Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang.
2. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok wanita tani dalam Pemanfaatan Pekarangan berupa Bantuan Pengembangan KRPL Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 pada 2 kelompok yaitu : KWT. Hamasah di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan dan KWT. Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
3. Berpartisipasi dalam mengikuti lomba Pengolahan Pangan dan Lomba Pangan Got Talent tingkat anak Sekolah Dasar Tingkat Propinsi Sumatera Barat di Padang Panjang pada tanggal 20-21 Agustus 2024.

Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA Untuk Penurunan Stunting di Nagari Koto Baru Koto Barapak Kec. Bayang



Penyampaian materi dan pembinaan oleh ketua TP PKK Kab.Pesisir Selatan Ibu Yunesti Rusmayul Anwar kepada peserta

Persiapan mengikuti Lomba Pengolahan Panganalent tingkat Prop. Sumbar



Pembuatan video peserta lomba Pengolahan pangan lokal, Display menu lomba pengolahan pangan dan lomba pangan got talent tingkat prop.sumbar tahun 2024

Mengikuti Lomba Pengolahan Pangan berbasis sumber daya lokal dan Lomba Pangan got talent Tingkat prop.sumbar tahun 2024 di padang panjang.



Acara diikuti oleh peserta dari TP PKK Nagari Painan Selatan Ketua dan Pokja 3 TP PKK Kab.Pesisir Selatan.

Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Konsumsi Pangan dari data Susenas Pola Pangan Harapan (PPH) di Dinas Pangan Prop.Sumbar.



Menghadiri Bimtek Penyusunan Analisa Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) Wilayah Sumatera I di Medan dan Mendampingi kelompok tani menghadiri Bimbingan Teknis dan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kegiatan Pengembangan KRPL tahun 2024 di Padang.



Pembinaan dan pendampingan kelompok wanita tani Hamasah di Nagari Kampuang Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan dan Melaksanakan verifikasi kelompok wanita tani Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang.

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil. Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 62.514.900,- dengan Realisasi sebesar Rp. 53.735.350,- atau 85,96%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

- I. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan , kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan
 - a) Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanaan Pangan. Sub kegiatan ini bertujuan ketersediaan Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.252.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.

27.480.350,- atau 90,84 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peta Ketahanan Pangan (FSVA).

Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



II. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota , terdiri dari 1 Sub Kegiatan

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kerawanan pangan pada balita stunting dan ibu menyusui, Pagu Anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 32.262.900,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 26.255.000,- atau 81,38 %.

Dokumentasi Penyaluran bantuan penanganan daerah rawan pangan



Kerawana pangan dan gizi dilakukan dalam rangka pencapaian kedaulatan panga, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Amanat UU Pangan kepada pemerintah adalah membangaun, Menyusun dan mengembangkan system informasi pangan yang terintegrasi dengan system peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis adalah:

1. penguatan system kewaspadaan pangan dan gizi.
2. penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan berdampak bencana
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan
4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi Masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

Sasaran 4 **Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan**

Pemanfaatan sumberdaya perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dengan potensi yang besar, perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 didukung oleh indikator kinerja produksi perikanan baik produksi budidaya maupun produksi tangkap, dengan capaian

kinerja. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.29
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694	60.942,68	120,22
Rata-rata Capaian					120,22

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa target indicator kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2024 melebihi target dengan capaian 120,22 % dengan prediksi sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2024 target sebesar 50.694 ton, dengan realisasi 60.942,68 ton (120,22 %).

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1.	Jumlah Produksi Perikaan Budidaya	Ton	14.278	14.490	14.608
2.	Jumlah Produksi Perikaan Tangkap	Ton	35.907	58.404,99	46.334,68
	Jumlah		50.185	72.894,99	60.942,68

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dapat juga disimpulkan bahwa Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,48 % dan pada tahun 2024 meningkat 0,82 % dari tahun 2023, begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2023 terjadi peningkatan dari

tahun 2022 sebesar 62,66 % (58.404,99 ton). Dan tahun 2024 turun 26 % (46.334,68 ton) namun masih tinggi dari target Renstra yaitu 36.086 ton.

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari upwelling yang terjadi di perairan laut. Dimana Upwelling (pembalikan massa air) adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena ini membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan tersebut. Peningkatan biomassa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut.

Karena air dari kedalaman yang dibawa ke permukaan seringkali mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, upwelling pada pesisir dapat membantu pertumbuhan rumput laut dan plankton. Selanjutnya, rumput laut dan plankton menjadi penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan, mamalia laut, dan burung-burung di daerah tersebut. Dan itu telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44.440	35.549	35.727	35.906	36.086	35.480	35.549	35.907	58.405	46.334,68	79,84	100	100,50	162,66	128,40
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	12.618	13.250	13.913	13.913	14.608	14.092	14.278	14.490	14.490	14.608	71,69	111,68	107,76	104,15	100,00
Jumlah	61.203	48.167	48.977	49.819	50.694	47.498	49.641	50.185	72.895	60.942,68	75,77	105,84	104,13	133,41	120,22

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Target produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 44.440 ton dan Realisasi sebesar 35.480 Ton atau dengan capaian 79,84 %, hal ini disebabkan terjadinya pandemic covid 19 yang mengakibatkan berkurangnya aktifitas nelayan dan daya beli masyarakat

terhadap produk perikanan. Pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan tangkap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 35.549 ton atau dengan capaian 100 %. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian produksi perikanan tangkap meningkat 100,50 % dari target yaitu 35.727 ton dengan realisasi 35.907 ton. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 162,66 % dari target tahun 2023 sebesar 35.906 ton dengan realisasi sebesar 58.405 ton dan tahun 2024 produksi perikanan tangkap masih meningkat dari target 36.086 ton dengan realisasi 46.334,68 atau sebesar 128,40 % , dari hasil 2 tahun terakhir merupakan dampak dari fenomena upwelling yang membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan sehingga berkontribusi meningkatkan produksi perikanan tangkap

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	60.942,68	50.694	120,22	

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Perikanan dengan Standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	60.942,68		

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator Jumlah Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694	60.942,68	120,22		

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.

Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, kapal jukung dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.35.
Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Jenis Bantuan yang diberikan	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
			DAK	APBD	DAK	APBD	APBD
1	Jaring	Pcs	65	564	1220	57	63
2	Mesin Tempel 15 PK	Unit	10	56	24	26	75
3	Mesin Tempel 40 PK	Unit	-	20	-	20	34
4	Mesin Long Tail	Unit	-	25	-	13	24
5	Fish Box	Unit	-	-	-	-	13
6	GPS	Unit	-	-	-	3	-
7	Perahu Fiber	Paket	7	-	14	-	-
	Jumlah		76	665	1258	119	209

Dari bantuan yang diberikan kepada nelayan memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin dan perahu fiber jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan GPS, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan, serta fish Box memudahkan nelayan untuk menyimpak hasil tangkapannya. Hal ini dapat dilihat hasil produuksi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
	Ikan Laut				
1	Alu-alu Sirip Hitam; Barakuda Sirip Hitam (Sphyaena qe dnie)	Ton	219,59	194,20	413,78
2	Bawal Hitam (Parastromateus niger)	Ton	34,04	28,04	62,08
3	Belanak (Chelon subviridis)	Ton	92,94	79,57	172,52
4	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	Ton	3.173,66	3.049,51	6.223,17
5	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	Ton	122,52	159,15	281,67
6	Gerot-gerot (Pomadasys andamanensis)	Ton	140,39	120,90	261,29
7	Gulamah (Gymnocranius griseus)	Ton	34,54	28,65	63,19
8	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	Ton	181,23	184,55	365,78
9	Kembung (Rastrelliger faughni)	Ton	3.479,59	3.064,92	6.544,51
10	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	Ton	226,78	191,13	417,90
11	Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus)	Ton	584,52	592,30	1.176,82

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
12	Kurisi (Pentapodus setosus)	Ton	329,66	267,80	597,46
13	Kuro; Senangin (Eleutheronema tetradactylum)	Ton	663,53	593,59	1.257,12
14	Kuwe (Carangoides armatus)	Ton	1.357,04	1.205,56	2.562,59
15	Layang (Decapterus maruadsi)	Ton	431,49	362,57	794,06
16	Layur (Trichiurus lepturus)	Ton	485,12	437,75	922,87
17	Lemadang (Coryphaena hippurus)	Ton	182,23	185,51	367,75
18	Lidah (Cynoglossus arel)	Ton	77,17	66,01	143,18
19	Manyung Besar (Arius thalassinus)	Ton	400,62	332,50	733,12
20	Pari Babi (Taeniura meyeni)	Ton	15,35	14,17	29,52
21	Peperek Bondolan (Leiognathus bindus)	Ton	658,85	537,22	1.196,08
22	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	Ton	209,12	191,59	400,71
23	Sotong (Pharaoh cuttlefish)	Ton	119,37	119,37	238,74
24	Swaggi (Priacanthus hamrur)	Ton	452,70	350,13	802,83
25	Tembang (Sardinella gibbosa)	Ton	460,70	362,65	823,35
26	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	Ton	490,11	467,46	957,57
27	Teri Indian (Stolephorus indicus)	Ton	3.795,68	3.535,88	7.331,55
28	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	Ton	156,26	149,74	306,00
29	Tongkol (Auxis thazard)	Ton	5.088,39	5.183,36	10.271,76
30	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	Ton	133,91	124,31	258,22
31	Udang Jerbung (Penaeus merguensis)	Ton	54,94	45,72	100,66
32	Udang Windu (Panaeaus monodon)	Ton	134,31	122,55	256,86
	Ikan Darat (PUD)				
33	Belut Sawah; Remang Sawah (Strophidon sathete)	Ton	11,61	11,56	23,17
34	Betok (Anabas testudineus)	Ton	10,07	9,78	19,84
35	Gabus (Channa striata)	Ton	8,61	8,38	16,99
36	Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	Ton	0,56	0,54	1,10
37	Lele (Clarias batrachus)	Ton	5,66	5,53	11,19
38	Mujair (Oreochromis mossambicus)	Ton	1,00	0,96	1,96
39	Nila (Oreochromis niloticus)	Ton	1,02	0,99	2,01
40	Nilem (Osteochilus vittatus)	Ton	1,26	1,21	2,47
41	Sepat Siam (Trichogaster pectoralis)	Ton	1,65	1,58	3,23
42	Sidat (Anguilla anguilla)	Ton	7,71	7,60	15,31
43	Tawes (Barbodes gonionotus)	Ton	1,43	1,39	2,82
44	Udang Putih; Udang Api-api (Metapenaeus eboraensis)	Ton	2,80	2,73	5,54
	TOTAL	Ton	24.039,73	22.400,56	46.440,29

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 60.942,68 ton dengan tingkat capaian 120,22 %. Capaian indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai *upaya* yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan antara lain:

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.
2. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
 - b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan
4. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil skala kecil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan tangkap :

Faktor Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan.

Hambatan yang masih ditemui dalam Upaya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah :

1. Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di perairan umum.
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative
5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

Upaya ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis jumlah produksi perikanan antara lain :

1. Peningkatan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

Produksi perikanan Budidaya tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu Lele, Nila, Gurame, Udang Vaname, Ikam Mas dan Kerapu dan lain-lain. Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut

Tabel 3.37
Bantuan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Tahun 2022, 2023, 2024

NO	JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan rasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele	Unit	1	-	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias	Unit	1	-	-
3	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele	Paket	3	3	1
4	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila	Paket	4	3	
5	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Gurame	Paket	1	12	1
6	Pembuatan Kolam	Unit	-	-	1
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (Pembuatan Kolam, Benih dan Pakan)	Unit	1	-	-
8	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Lele	Paket	1	-	-
9	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Hias	Paket	1	-	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Paket	2	-	-
Total			15	18	3

Dari bantuan yang diberikan kepada pembudidaya ikan memberikan dampak positif meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya perjenis ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38
Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
1	Ikan Mas	Ton	351,870	347,300	699,170
2	Nila	Ton	2.584,680	2.081,900	4.666,580
3	Gurame	Ton	1.539,000	1.441,200	2.980,200
4	Lele	Ton	2.502,400	2.336,200	4.838,600
5	Kerapu	Ton	20,710	14,780	35,490
6	Udang Vaname	Ton	371,400	762,300	1.133,700
	Total		7.370,06	6.983,680	14.353,740

* Estimasi Produksi

Tabel 3.39 PRODUKSI BENIH IKAN

BBI PINCURAN BOGA

Januari sd Desember 2024

No	Tanggal	Tujuan	Nama	Jenis	Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (ekor)			Jumlah Benih	Jumlah PAD (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)	JUMLAH	Ket.
							Lele	Nila	Gurami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02/01/2024	IV Jurai	Herwindi	Benih	3-5 cm	160		1.000		1.000		160.000	160.000	Bantuan
2	18/01/2024	Inderapura	Suwanto	Benih	3-5 cm	160		2.000		2.000		320.000	320.000	Bantuan
3	02/02/2024	Inderapura	Sandra Cahnia	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
4	06/02/2024	Sutera	Suci Bulandari	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
5	12/02/2024	Kodim 133	Serda Ali Mardoni	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
6	28/02/2024	IV Jurai	M Husni	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
7	21/03/2024	Batang Kapas	Iju	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
8	22/03/2024	Bayang	Indah	Benih	8 - 12 cm	500	2.000			2.000		1.000.000	1.000.000	Bantuan
9	23/03/2024	Tarusan	Monic	Benih	8 - 12 cm	500	1.000			1.000		500.000	500.000	Bantuan
10	22/04/2024	Bayang	Desi	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
11	22/04/2024	IV Jurai	Buya Suhendri	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
12	23/04/2024	IV Jurai	Pinto	Benih	8 - 13 cm	500	1.000			1.000		500.000	500.000	Bantuan
13	28/05/2024	IV Jurai	Rifa	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000		800.000	800.000	Bantuan
14	20/06/2024	Bayang	Adam	Benih	3 - 5 cm	160	3.000			3.000		480.000	480.000	Bantuan
15	5 Juli	Lengayang	Epi	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
15	5 Juli	Lengayang	Epi	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
16	08/08/2024	Pancung Soal	Jon	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000		800.000	800.000	Bantuan
17	12/08/2024	Linggo Sari Baganti	Mardison (Pokdakan lagan Sepakat)	Benih	3-5 cm	160	17.500			17.500		2.800.000	2.800.000	Bantuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	27/09/2024	Salido Kec. IV Jurai	Saiful Ikhlas	Benih	2-3 cm	100	5.000			5.000		500.000	500.000	Bantuan
18	30/09/2024	Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo Kec. IV Jurai	Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo	Benih	2-3 cm	100	6.500			6.500		650.000	650.000	Bantuan
19	28/10/2024	Dani	Tapan	Benih	2-4 cm	100	10.000			10.000		1.000.000	1.000.000	Bantuan
20	18/11/2024	Polres	Painan		3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
21	Retribusi		Retribusi	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000	800.000		800.000	PAD
				Benih	2-3 cm	100	27.000			27.000	2.700.000		2.700.000	PAD
TOTAL							115.500	23.000	-	138.500	3.500.000	19.660.000	23.160.000	-

Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga milik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tahun 2024 melakukan pembibitan Ikan Nila dan Ikan Lele, yang menghasilkan sebanyak 138.500 benih. Dari semua benih tersebut sebagian besar diberikan ke kelompok pembudidaya ikan yaitu sebanyak 115.500 benih dan 23.000 benih dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian produksi Perikanan Budidaya dapat dilihat bahwa target produksi perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 12.618 ton dan realisasi sebesar 14.092 Ton atau dengan capaian 111,68. Pada tahun 2022 realisasi produksi perikanan Budidaya yaitu 13.25, realisasi sebesar 14.278 ton atau dengan capaian 107,76 %. Sedangkan untuk tahun 2023 target produksi perikanan Budidaya sebesar 13.913 ton dengan realisasi 14.490 ton. Dan pada tahun 2024 target perikanan Budidaya 14.608 ton dengan realisasi sebesar 14.759,14 ton dengan capaian sebesar 101,04 ton :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan budidaya :

Hambatan yang dihadapi dari capaian sasaran strategis

1. Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
3. Kurangnya permodalan pembudidaya untuk pengembangan budidaya ikan
4. Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya
5. rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan
6. Masih sulitnya pemasaran membuat pembudidaya kurang berkembang karena masih bersifat lokal.
7. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
8. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif

Upaya yang dilakukan

1. Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan

2. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
3. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha
4. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan,temu tekins hama dan penyakit ikan
5. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat
6. Pendampingan oleh tenaga pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) agar pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal
7. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

Untuk mempertahankan keberhasilan ini dan mengatasi tantangan di masa depan, diperlukan upaya optimalisasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya PDRB Sektor unggulan dengan indicator kinerja jumlah produksi perikanan, perlunya sumberd daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Sumber anggaran yang memadai.

3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.40
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 202 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp. 4.949.404.281,- dan terealisasi Rp. 4.772.914.968,- (96,43%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,57 dengan uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24	100,00	172.025.164
12	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.989.949	7.699.660	96,37	100,00	290.289
29	Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.989.949	7.699.660	96,37	100,00	290.289

13	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.567.298.358	4.395.563.483	96,24	100,00	171.734.875
	30 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.560.026.358	4.389.478.883	96,26	100,00	170.547.475
	31 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	7.272.000	6.084.600	83,67	100,00	1.187.400
E	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	374.115.974	369.651.825	98,81	100,00	4.464.149
14	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89	100,00	2.770.350
	32 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89	100,00	2.770.350
15	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	124.042.624	122.348.825	98,63	100,00	1.693.799
	33 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.042.624	122.348.825	98,63	100,00	1.693.799
	JUMLAH	4.949.404.281	4.772.914.968	96,43	100,00	176.489.313

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 4. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2024 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.42
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.115.974	369.651.825	98,81
	Jumlah	4.949.404.281	4.772.914.968	96,43

Capaian Sasaran strategis 4 didukung oleh Beberapa Program yaitu:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.731.273.922,- dengan realisasi Rp. 5.236.185.649,- dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana APBD/APBD-P Pagu anggaran sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.560.026.358- (*Empat milyar lima ratus enam puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).- terealisasi belanja sebesar Rp. 4.389.478.883.- (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*).- atau terealisasi 96,25 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100% , rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD)

- 1) Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (APBD) 72 unit
- 2) Pengadaan Mesin Tempel 40 PK (APBD) 34 unit
- 3) Pengadaan Mesin Long Tail 6,5 PK (APBD) 24 unit
- 4) Pengadaan Jaring Trammel Net (APBD) 63 piece
- 5) Pengadaan Cool Box (APBD) sebanyak 13 unit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

1. Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (APBD-P) 3 unit

SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN KECIL

Dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2024 ini juga dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Kabupaten Pesisir Selatan. Pelatihan dilaksanakan 1 (satu) hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di Hotel Triza Painan Jl. Dr. Hamka - Painan.

Narasumber pada pelatihan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Painan
3. Petugas Kesyahbandaran Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Peserta pada pelatihan tersebut berjumlah 75 orang nelayan yang merupakan nelayan penerima Hibah / Bantuan baik dari APBD Kabupaten Pesisir Sealatan

maupun dari APBD Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun Anggaran 2024. Peserta tersebut terdiri dari :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan : 6 orang
 2. Kecamatan Bayang : 4 orang
 3. Kecamatan IV Jurai : 6 orang
 4. Kecamatan Batang Kapas : 6 orang
 5. Kecamatan Sutera : 2 orang
 6. Kecamatan Lengayang : 9 orang
 7. Kecamatan Ranah Pesisir : 4 orang
 8. Kecamatan Linggo Sari Baganti : 10 orang
 9. Kecamatan Airpura : 2 orang
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Dari pagu anggaran Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.272.000,- (*Tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).- terealisasi belanja sebesar Rp. 6.084.600.- (*Enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah*).- atau terealisasi 83,67 % dari pagu anggaran namun demikian fisik kegiatan terlaksana 100%, dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Bantuan atau hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat yang telah difasilitasi kegiatan ini adalah :

- 1) Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0,25 : 172 piece
- 2) Bantuan Mesin Tempel 15 PK Kementerian Kelautan dan Perikanan : 20 unit
- 3) Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diserahkan kepada :

POKMAS PERMATA PULAU PUTI	Kampung	: Air Ubah	Rp. 600.000.000.-
	Nagari	: Pulau Rajo Indrapura	
	Kecamatan	: Airpura	

Penataan yang dilaksanakan di lokasi KALAJU adalah :

- Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan

- Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Gapura
 - Pengadaan Penerangan Jalan Umum
- 4) Bantuan Mesin Long Tail dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak : 14 Unit
 - 5) Bantuan Fish Box dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupa :
 - Fish box 200 liter : 50 unit
 - Fish box 100 liter : 100 unit
 - 6) Bantuan Alat Penangkapan Ikan Gillnet Monofilamen dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat : 100 piece

Penyerahan Hibah / Bantuan Anggaran Apbd Ta 2024

1. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti Dan Kecamatan Airpura Berlokasi Di Posko Koperasi Nelayan Beringin Sakti Kampung Sumedang Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir



2. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera Dan Kecamatan Lengayang Berlokasi Di Lapangan Volly Ball Merah Putih Hambalang Ujung Air Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera

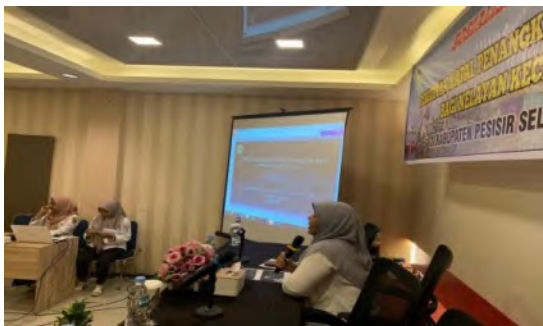


3. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Iv Jurai, Kecamatan Bayang Dan Kecamatan Koto Xi Tarusan Berlokasi Di Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto Xi Tarusan





4. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Anggaran Apbd Ta 2024



5. Monitoring Pekerjaan Kampung Nelayan Maju



6. Penyerahan Bantuan Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Nelayan Melalui Apbd Provinsi Sumatera Barat Ta 2024



B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran sebesar Rp. 374.115.974,- dengan realisasi anggaran Rp. 369.651.825.- yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan budidaya, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana APBD, yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 250.073.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 247.303.000.- atau 98.89 %.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian :

- ✓ Pengadaan Benih Ikan Gurame dan Pakan 1 paket : Pokdakan Solok Jambak Saiyo Kec. IV Jurai
 - Benih : 18.000 ekor
 - Pakan 781 : 28 karung
 - Pakan 781-2 : 45 karung
- ✓ Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan 1 paket : Pokdakan Bina Tani Nusantara Kec. Lengayang
 - Benih : 20.000 ekor
 - Pakan Benih PF 1000 : 3 karung
 - Pakan 781 : 15 karung
 - Pakan 781-2 : 20 karung
 - Pakan 781 - 3 : 40 karung
- ✓ Pembuatan Kolam Pokdakan Bina Tani Nusantara 1 paket : Pokdakan Bina Tani Nusantara Kec. Lengayang
 - 3 buah kolam 3 x 6 m

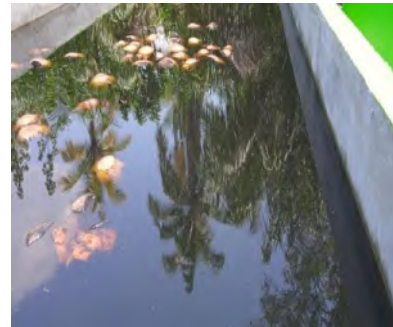
1. Pengadaan Benih Ikan Gurame dan Pakan



2. Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan



3. Pembuatan Kolam Pokdakanan Bina Tani Nusantara



II. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya , yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan .

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar

Rp. 124.042.624,- dengan realisasi anggaran Rp. 122.348.825,- atau 98.63 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga dan pembinaan ke kelompok budidaya.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

- a) Bantuan yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Benih Ikan Nila sebanyak 79.950 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Penjualan Benih Ikan Nila sebanyak 12.375 ekor sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5.445.000,-.

Dokumentasi Bantuan Benih Ikan Lele Untuk Pokdakan Lagan Sepakat Dalam Rangka Mendukung Tmmd Ke 121 Tahun 2024



Bantuan Untuk Polres Pesisir Selatan



3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2024. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 6 (enam) program dan 16 (tiga belas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui APBD tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar sebesar Rp. 11.072.645.124,- (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran
1.	Belanja Operasional	11.047.609.074	10.415.178.315	94,28	632.430.759	5,72
2.	Belanja Modal	25.036.050	22.800.000	91,07	2.236.050	8,93
	Jumlah	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27	634.666.809	5,73

Sumber :Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.072.645.124,- (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp. 10.437.978.315,- (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar 94,27%, dengan efisiensi anggaran sebesar 5,73 %, seperti tercantum pada tabel 3.37.

Tabel 3.44
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Belanja		
							Anggaran	Realiasi	Capaian
							Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	A (81,50)	A (81,46)	99,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.437.042.978	5.049.607.393	95,80
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.504.365.292	4.140.611.767	91,92
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.945.292	3.937.203.111	91,95
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.260.000	191.252.336	90,96
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.160.000	12.156.320	99,97
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.331.850	404.298.064	97,34
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.860.400	11.848.840	99,90
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	26.086.050	22.800.000	87,40
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.095.090	39.093.965	100,00
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.332.310	27.573.840	97,32
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.104.000	76,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.005.000	3.427.500	68,48
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.553.000	295.449.919	98,63
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.837.418	235.791.614	95,53
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.400.000	91.355.919	90,09
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.437.418	144.435.695	99,31
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.320.000	209.716.496	99,71
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	56.600.000	56.029.704	98,99
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	109.700.000	109.686.792	99,99
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.100.000	22.100.000	100,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.920.000	21.900.000	99,91
2	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	62.889.550	62.726.100	99,74
						Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6.889.550	6.838.600	99,26
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	55.887.500	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	56.000.000	55.887.500	99,80
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87	88,2	101,37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415	498.994.504	88,98
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	299.999.860	276.097.554	92,03
						Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	299.999.860	276.097.554	92,03
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	235.000.005	197.138.650	83,89
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.112.000	187.387.000	89,18
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.888.005	9.751.650	39,18
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	25.793.550	25.758.300	99,86
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.793.550	25.758.300	99,86
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900	53.735.350	85,96
						Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.252.000	27.480.350	90,84
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.252.000	27.480.350	90,84
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38
4	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694	60.942,69	120,22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24
						Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.989.949	7.699.660	96,37
						Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.989.949	7.699.660	96,37
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.567.298.358	4.395.563.483	96,24
						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.560.026.358	4.389.478.883	96,26
						Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	7.272.000	6.084.600	83,67
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	374.115.974	369.651.825	98,81
						Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89
						Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	124.042.624	122.348.825	98,63
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.042.624	122.348.825	98,63
						TOTAL	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran strategis, 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian melebihi target yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yaitu 101,37% dan Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan 120,22%. Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis yang lainnya dibawah target namun masih dalam predikat **sangat baik** yaitu sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan capaian 99,95 % dan meningkatnya kualitas inovasi daerah yaitu dengan capaian 93 %,

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2023. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 81,46 (A) dari target 81,50 (A) atau dengan predikat “ baik”.
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 93 dari target nilai 100 atau dengan predikat “sangat baik”. pemanfaatan inovasi dalam kegiatan Sosialisasi Gemarikan, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

- 3) Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,20 dari target yang ditetapkan 87.00 atau dengan capaian 101,37 % atau dengan capaian “sangat baik”. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
- 4) Produksi Perikanan dengan realisasi 60.942,68 Ton dari target 50.694 Ton dengan capaian 120,22 %, dengan predikat “sangat baik”.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 103,63% dengan predikat “ **sangat baik**”

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah **Rp. 11.072.645.124,-** (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 10.437.978.315,-** (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar **94,27%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **5,73 %**.

Secara umum sasaran yang telah disusun dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dengan persentasi capaian 4 indikator dengan predikat **sangat baik**, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemui sejumlah **kendala/permasalahan –permasalahan** sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu
- 2) Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.

- 3) Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.
- 4) Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu
- 5) Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
- 6) Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
- 7) Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas
- 8) Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
- 9) Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.
- 10) Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya dan nelayan.

Upaya kedepan yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana serta modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
- 2) Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan
- 3) Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan
- 4) Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya
- 5) Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

4.2 Saran

Dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan :

1. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
3. Perlunya peningkatan kompetensi Sumberdaya ASN Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan baik bidang perikanan maupun bidang pangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Diharapkan dapat menambah informasi/data penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun berikutnya.



LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realiasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Hasil pemantauan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021-2026;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori *interval* ini akan membantu pengklarifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Katergori *interval* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2023

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai program RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai 2 urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

2.1 Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.498.186.348,- dengan realisasi Rp. 1.555.320.683,- atau sebesar 28,29 %, yang terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Pagu Anggaran Program ini Rp. 5.122.275.538,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 1.527.939.283,- atau 29,83 %. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 313.395.910,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 13.526.400,- atau 4,32 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi nyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya

III. Program penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 62.514.900,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 13.855.000,- atau 3,28 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.167.444.698, - dengan realisasi Rp 81.376.185, - atau sebesar 1,38%, terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 4.475.288.407, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 30.243.751, - atau 0,68 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 374.116.084, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 30.248.500, - atau 8,09 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 42.889.550, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 7.010.000, - atau 16,34 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan I Tahun 2024

No	Urusan	Rencana Kerja 2024	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2024 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
					Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
I. Urusan Wajib								
1	Bidang Pangan	5.234.227.388	5.498.186.348	1.555.320.683	22%	SR	28,29%	SR
II. Urusan Pilihan								
1	Bidang Perikanan	5.714.894.060	4.892.294.041	67.502.251	26%	SR	1,38%	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2024 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya sangat rendah (SR) baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Hal ini disebabkan beberapa program dan kegiatan belum terlaksana.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa atasi.
2. Agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 2 April 2024
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

No	Sesran	Kode Rekening	Uraian/Bidang Usahat Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)		Target Kinerja Rencana PD pada Tahun 2028		Capaian Kinerja Rencana PD mungkin tercapai (RPD Tahun Lanj (2022)		Target Kinerja dan Anggaran ROPD Tahun Berjalan (2023) yang Dirombak		Realisasi Kinerja Pada Threadan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran ROPD yang Dirombak		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD Tahun 2023 (Aksi Tahun Pelaksanaan RPD tahun 2023) 14 = 7 + 13		Target Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Harata PD s.d Tahun 2023 15 = 148 x 105 %		Sifat/TP Pemerangan g Jeneb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

A thick dark grey vertical bar runs down the left side of the page. A light grey arrow points to the right, overlapping the bar.

LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam s uatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realiasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Hasil pemantauan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024, guna:

- Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021-2026;
- Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024
- Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori *interval* ini akan membantu pengklarifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori *interval* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2024

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai program RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai 2 urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

2.1 Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.498.186.348,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II adalah Rp. 2.627.461.226,- atau sebesar 47,78 %, yang terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Pagu Anggaran Program ini Rp. 5.122.275.538,- dengan realisasi capaian kinerja output sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 2.577.300.976,- atau 50,31 %. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 313.395.910,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 27.580.250,- atau 8 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi nyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya

III. Program penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 62.514.900,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 22.580.000,- atau 36,11 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.167.444.698, - dengan realisasi Rp 149.569.251, - atau sebesar 2,9%, terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 4.475.288.407, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. Rp. 64.501.251, - atau 1,44 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 374.116.084, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 62.062.000, - atau 16,59 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 42.889.550, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 23.006.000, - atau 53,64% %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan	Rencana Kerja 2024	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2024 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
					Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
I. Urusan Wajib								
1	Bidang Pangan	5.234.227.388	5.498.186.348	2.777.030.477	44%	SR	50,51%	R
II.Urusan Pilihan								
1	Bidang Perikanan	5.714.894.060	4.892.294.041	149.569.251	59%	R	3,57%	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2024 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya sangat rendah (SR) baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Hal ini disebabkan beberapa program dan kegiatan belum terlaksana dengan optimal. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdapat belanja hibah yang masih dalam proses pengerjaan.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa atasi.
2. Agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 5 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



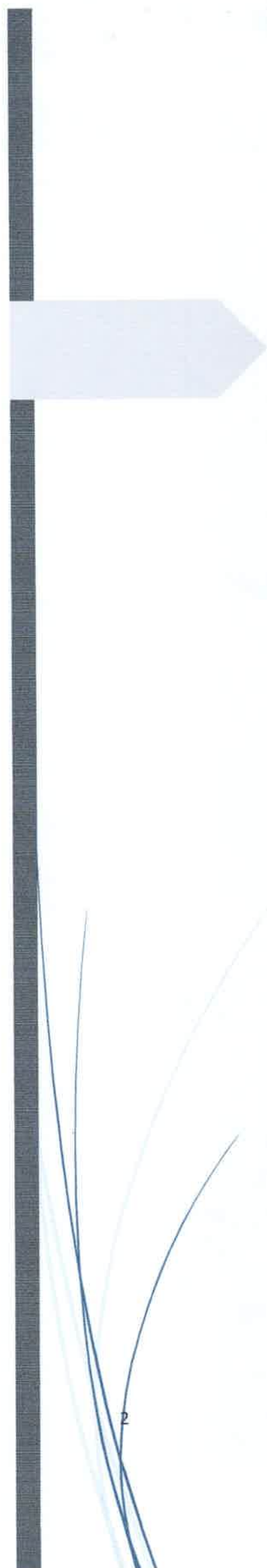
FIRDAUS, S.Pi

	2	05	01	2.05	05	Penelitian Bangun Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Penggandaan yang	Paket	60	182.441.778	24	47.860.275	12	18.516.155	3	4.460.990	3	7.286.160					6	11.788.140	30	59.489.415	50		37
	2	05	01	2.05	06	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan yang	Dokumen	60	30.102.142	24	7.254.000	12	5.400.000	3	1.020.000	3	1.026.000					6	2.002.000	30	9.326.000	50		31
	2	05	01	2.05	08	Fasilitas Konjugasi Tawar	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	20	37.403.468	3	4.850.400	4	7.727.500	0	3.175.500	0	202.500					0	3.468.000	3	8.363.400	15		22
	2	05	01	2.05	09	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	60	1.703.964.039	24	536.277.087	12	271.983.000	3	50.879.336	3	47.814.800					6	98.794.139	30	638.071.236	50		37
	2	05	01	2.05	2.05	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	100	384.071.689	40	659.592.846	84	254.539.000	5	90.965.000	5	43.740.900					10	134.715.600	50	734.088.689	90	77.000.000	
	2	05	01	2.05	02	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	60	562.365.109	24	326.081.367	12	108.000.000	3	25.056.309	3	19.306.657					6	44.368.986	30	374.428.330	50		64
	2	05	01	2.05	04	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	60	371.708.750	24	301.591.479	12	146.538.000	3	35.504.511	3	24.634.245					6	80.338.866	30	382.240.336	50		87
	2	05	01	2.05	2.05	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	100	2.268.368.376	40	1.107.722.840	84	202.270.000	5	31.584.930	5	38.293.377					12	118.826.477	50	1.177.556.900	90	91.300.000	
	2	05	01	2.05	02	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	60	247.832.187	3	386.245.314	1	56.800.000	1	6.851.000	1	15.448.710					1	22.389.710	1	420.646.004	30		170
	2	05	01	2.05	02	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	210	1.433.037.500	84	527.787.825	42	115.200.000	10	21.861.000	10	14.966.867					20	36.822.767	104	594.627.696	50		26
	2	05	01	2.05	06	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	100	148.809.105	40	41.455.000	20	14.460.000	5	2.770.000	5	2.800.000					30	5.800.000	50	47.035.000	30		30
	2	05	01	2.05	09	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	25	716.518.750	10	140.244.200	5	15.860.000	1	-	1	5.000.000					2	5.000.000	12	148.244.200	48		20
	2	05	02	2.01		Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	60	4.422.000.000	94,12	7.246.813.886	11	-	8	-	-	-					0	-	34.117.617,95	7.330.813.886	116.728.64	185.764.028	
	2	05	02	2.01		Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	36	4.422.000.000	94,08	7.246.813.886	8	-	8	-	-	-					0	-	88,086	7.330.813.886	208,40	185.764.028	
	2	05	02	2.01	01	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	9	1.175.000.000	7	1.022.750.800	0	-	0	-	-	-					0	0	7	1.022.750.800	78		87
	2	05	02	2.01	02	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	9	587.500.000	7	184.306.420	0	-	0	-	-	-					0	0	7	184.306.420	78		31
	2	05	02	2.01	03	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	9	1.350.000.000	7	5.407.940.748	0	-	0	-	-	-					0	0	7	5.407.940.748	78		401
	2	05	02	2.01	04	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	180	750.000.000	12	215.372.780	0	-	0	-	-	-					0	0	12	215.372.780	20		26
	2	05	02	2.01	05	Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	8	590.000.000	7	500.541.115	0	-	0	-	-	-					0	0	7	500.541.115	78		86
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	24,40	3.877.884.829	2,15	499.578.918	207,1	208.791.188	0	93.338.488	0	14.883.390					0	14.883.390	211,5	330.345.90	86,180,028	74.000,244,1	
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	6,3	-	0	-	61	-	-	-	-	-					0	-	8	-	0		
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	18	-	95	-	18	-	-	-	-	-					0	-	96	96,000,718	-		
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	18	-	97	-	18	-	-	-	-	-					0	-	97	96,579,582	-		
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	39,2	-	100	-	39	-	-	-	-	-					0	-	100	100,000,000	-		
	2	05	03			Penelitian Bahan Baku dan Pemasangan Perakitan	Jumlah Laporan Fasilitas Konjugasi Tawar	Laporan	98,5	-	100	-	98	-	-	-	-	-					0	-	98	100,000,000	-		

3	25	08	2.03	02	Pembelian Fasilitas bagi Pekerja dan Pejabat Staf Mikro dan Kecil (dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota)	Jumlah Belanja (Rp)	Persentase dari Keti dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	991.518.750	100	423.487.075	100	36.000.000	0	7.010.000	12.640.000	0	19.690.000	100	443.137.075	100	46
PERINGKAT KEMERIAJIAN																						
46.18																						
113.50																						
57																						

aktor pendanaan lebih kecil lagi
- aktor pemenuhan program lain
Terdapat juga yang dapat dilihat dalam bentuk yang
tidak dapat dilihat dalam bentuk yang





LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN III TAHUN 2024

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan efisiensi dan efektifitas program diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan perencanaan organisasi perangkat daerah yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja. Hal ini dianggap penting agar akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dapat terlaksana. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realiasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 30 September 2024. Hasil pemantauan pelaksanaan

program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024, guna:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021-2026;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori *interval* ini akan membantu pengklarifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Katergori *interval* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2024

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai program RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai 2 urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

2.1 Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.498.186.348,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III adalah Rp. 3.788.099.316,- atau sebesar 68,90 %, yang terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Pagu Anggaran Program ini Rp. 5.122.275.538,- dengan realisasi capaian kinerja output sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. Rp3.684.487.116,- atau 71,39 %. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 313.395.910,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp . 27.580.250,- atau 16,99 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi nyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya

III. Program penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 62.514.900,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 37.460.000,- atau 59,92 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.167.444.698, - dengan realisasi Rp. 426.351.061,00, - atau sebesar 5,94%, terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 4.475.288.407, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. Rp. 361.849.810, - atau 8,08 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 374.116.084, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 62.062.000, - atau 16,59 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 42.889.550, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 23.006.000, - atau 53,64% %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan III Tahun 2024

No	Urusan	Rencana Kerja 2024	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2024 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
					Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
I. Urusan Wajib								
1	Bidang Pangan	5.234.227.388	5.498.186.348	3.775.199.316	70%	S	68%	S
II. Urusan Pilihan								
1	Bidang Perikanan	5.714.894.060	4.892.294.041	711.603.036	79%	T	15%	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2024 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya sedang (S) pada urusan pangan dan dan tinggi (T) pada urusan Perikanan. Urusan Pangan memiliki capaian yang lebih rendah disebabkan oleh beberapa output kegiatan terlaksana pada triwulan IV seperti Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal serta kegiatan rutin kantor pada Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Capaian Keuangan pada Urusan Pangan dan Urusan Perikanan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengembalian anggaran melalui kontra pos dan belum dimemorialkan melalui aplikasi SIPD pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu. Penyebab kedua adalah masih belum terlaksananya pengadaan Penggilingan Padi Kecil (PPK) pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dikarenakan calon penerima bantuan terdampak bencana banjir pada awal tahun 2024. Capaian keuangan pada urusan perikanan rendah disebabkan oleh proses pencairan pekerjaan terlaksana pada awal bulan Oktober 2024.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa atasi.

2. Agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 7 Oktober 2024
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si
NIP. 19700621 199303 1 001

Tabel E.60 (PMDN 86 / 2017)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
Priode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Kegiatan dan Program/Proyek/Instansi	Target Kinerja Reaksi (Dijual)			Capaian Kinerja Reaksi (Dijual)			Target Kinerja dan Anggaran RPO Tahun Berjalan (2024) yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Indikasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPO yang Direvisi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Revisi PO Akt Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPO tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Revisi PO Akt Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPO tahun 2024)				
				Indikator	Satuan	K	R	P	K	R	P	K	R	P	K	R	P	K	R	P	K	R	P	K	R	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Mendukung Tiba Keadilan Organisasi	2	01	URAIAN PERSENTAJAN DAN PERSENT																							

	2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadukan	Paket	60	262.402.460	24	92.202.604	12	38.095.060	3	10.207.000	3	8.518.900	3	8.144.000						0	26.869.900	33	119.072.204	55,00	46,38
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Gubatan dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Gubatan dan Pengendalian yang Diadukan	Paket	60	162.441.776	24	47.880.275	12	18.518.155	3	4.889.980	3	7.289.160	3	4.475.702						0	15.264.840	33	63.945.115	66,00	39,36
	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perencanaan dan Pengendalian yang Diadukan	Dokumen	60	30.102.142	24	7.254.000	12	5.400.000	3	1.026.000	3	1.026.000	3	1.026.000						0	3.078.000	33	10.332.000	66,00	34,32
	2	09	01	2.06	08	Fasilitas Konsumsi dan Fasilitas Konsumsi	Jumlah Laporan Fasilitas Konsumsi dan Fasilitas Konsumsi yang Diadukan	Laporan	20	37.403.469	3	4.925.400	4	7.727.500	0	3.175.000	0	262.500	0	-2.133.000						0	1.335.000	3	6.260.400	15,00	16,74
	2	09	01	2.06	09	Penyediaan Laporan dan Koordinasi dan Koordinasi	Jumlah Laporan dan Koordinasi dan Koordinasi yang Diadukan	Laporan	60	1.703.864.039	24	538.277.607	12	271.593.000	3	50.879.339	3	47.914.800	3	88.857.750					-	0	161.361.888	33	706.626.986	55,00	41,47
	2	09	01	2.08		Regulasi Penyediaan Jasa dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Penyediaan Jasa dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Jenis	100	1.024.074.859	40	629.362.546	20	254.139.500	5	60.882.620	5	43.742.807	5	59.304.000					15	164.008.915	58	788.872.181	54,00	77,53	
	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	60	562.306.108	24	338.061.367	12	168.000.000	3	25.868.308	3	19.308.607	3	24.804.555					8	69.271.521	33	367.332.866	55,00	68,23	
	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pengendalian dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	60	441.708.750	24	301.801.479	12	146.539.509	3	35.004.611	3	24.434.246	3	34.395.338					9	64.793.394	33	306.839.873	55,00	88,80	
	2	09	01	2.09		Regulasi Penyediaan Jasa dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Penyediaan Jasa dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Jenis	100	2.208.385.335	40.294.119,5	708.132.740	28	293.210.500	5	31.684.100	7.441.880,481	38.746.337	43.242.688					19,88	131.675.145	65.1782868	286.022.686	65,04	36,72		
	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	5	247.832.187	3	48.678.914	1	56.800.000	1	6.861.000		15.446.710		18.046.000					1	40.444.710	1	86.121.324	20,00	35,96	
	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	210	1.433.037.500	84	527.797.629	42	115.260.000	10	21.983.100		14.896.867	10	32.546.088					30	69.375.405	114	597.173.394	54,29	41,67	
	2	09	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	100	148.800.105	40	41.035.000	20	14.460.000	5	2.770.000		2.830.000	5	3.600.000					16	9.200.000	55	50.635.900	56,00	34,00	
	2	09	01	2.09	09	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	25	718.518.750	10	140.344.200	5	16.890.000	1	-	1	6.000.000	1	7.860.800					3	12.850.000	13	153.044.200	52,00	21,37	
Menyediakan Fasilitas Pengendalian	2	09	02			Program Pengendalian Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Kerja	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Jenis	95	4.022.100.000	94,12	7.230.813.865	0	-	0	-	-	-	-	-					0	-	64.1704026	7.330.813.865	119,21	109,78	
	2	09	02	2.01		Regulasi Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	30	4.022.100.000	0	7.230.813.865	0	-	0	-	-	-	-	-					0	-	6	7.330.813.865	40,00	183,74	
	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Paket	9	1.175.000.000	7	1.022.750.820	0	-	0	-	-	-	-	-					0	0	7	1.022.750.820	77,78	87,94	
	2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Paket	9	587.800.000	7	184.308.432	0	-	0	-	-	-	-	-					0	0	7	184.308.432	77,78	31,37	
	2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Unit	9	1.350.000.000	7	5.407.940.748	0	-	0	-	-	-	-	-					0	0	7	5.407.940.748	77,78	400,59	
	2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	80	750.000.000	12	215.372.780	0	-	0	-	-	-	-	-					0	0	12	215.372.780	20,00	28,72	
	2	09	02	2.01	05	Penyediaan Fasilitas dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Dokumen	0	540.000.000	7	500.941.115	0	-	0	-	-	-	-	-					0	0	7	500.941.115	77,78	88,38	
	2	09	03			Program Pengendalian dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	240	3.772.594.425	2030	495.079.912	2271	230.794.369	0	13.126.489		14.633.000	2.110	25.671.999					2115	53.282.289	2.115	848.831.112	88,66	14,34	
						Program Pengendalian dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	67	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55					57,9	55	55	55	55	55	55
						Program Pengendalian dan Fasilitas dan Fasilitas	Jumlah Laporan dan Fasilitas dan Fasilitas yang Diadukan	Laporan	56	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95					9	9	9	9	9	9	9	

	3	25	06	2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyuliran Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ragam Praktek Perikanan Budidaya Sering	regan	27	891.518.750	15	423.467.075	15	38.000.000	7.610.000	12.840.000	3	13.840.000	32.200.000	18.00	453.777.075	65.87	47.40
	3	25	06	2.03	Pembelian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Praktek Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Perikanan	Pelaku Usaha	100	891.518.750	20	423.467.075	40	38.000.000	0	7.610.000	12.840.750	0	32.200.750	40.00	455.165.825	40.00	47.40
Faktor pendukung keberhasilan ialah: Faktor pendukung pencapaian kinerja: Tidak terdapat yang diperoleh dalam bentuk lainnya. Tidak terdapat yang diperoleh dalam bentuk lainnya.																						
PERINGKAT KNEPIJA																		R		R		
																		R		R		
																		R		R		
																		R		R		



A thick vertical black bar on the left side of the page, with a light blue arrow pointing to the right, partially overlapping it.

LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2024

Three thin, curved lines in light blue and grey, resembling stylized waves or reeds, located in the bottom left corner.

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024, guna:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021-2026;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori *interval* ini akan membantu pengklarifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Katergori *interval* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2024

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai program RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai 2 urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

2.1 Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.498.186.348,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah Rp 6.060.351.293,- atau sebesar 98,07%, yang terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi. Pagu Anggaran Program ini Rp. 5.437.042.978,- dengan realisasi capaian kinerja output sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 5.049.607.393,- atau 93 %. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 560.793.415,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp . 498.994.504,- atau 88,98%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi nyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya

III. Program penanganan Kerawanan Pangan

Sasaran Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 62.514.900.- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 53.735.350,- atau 85,96 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Dinas Perikanan dan Pangan terhadap renstra pada bidang pangan tergolong kategori Sangat Tinggi (ST) pada capaian kinerja dan Rendah (R) pada capaian realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pola konsumsi masyarakat yang tergambar pada capaian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan dimana konsumsi energi dan protein melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Konsumsi Gizi dengan capaian diatas 97% (Lampiran 1).

Capaian Kinerja yang tidak sejalan dengan capaian Anggaran disebabkan oleh keterbatasan Anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan terhenti sebelum tahun RKPD berjalan. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya capaian kinerja di kegiatan penting seperti Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan dengan target 146, ton dan capaian 21 ton sampai periode RKPD 2024. Target kinerja yang rendah juga berpengaruh dalam capaian, hal ini disebabkan penetapan target rendah pasca pemulihan ekonomi akibat dampak covid 19.

2.2 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.012.293.831, - dengan realisasi Rp 4.835.641.068,- atau sebesar 96,48%, terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 4.575.288.307, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 4.403.263.143, - atau 96,24 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan Yaitu

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 374.116.084, - dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 369.651.825, - atau 98,81 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

2. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

III. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran Pengawasan Keamanan Pangan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan. Pagu Anggaran Program ini Rp. 62.889.550,- dengan realisasi capaian kinerja output adalah sebesar Rp. 62.726.100,- atau 99,74 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .

Capaian Kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terhadap renstra tergolong kategori sedang. Hal ini tergambar pada capaian per program/kegiatan yang mencapai target tahunan, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan optimal. Subkegiatan seperti Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat mencapai capaian optimal yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024

Ringkasan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan IV Tahun 2024

No	Urusan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
							%	Kategori	%	Kategori
I. Urusan Wajib										
1	Bidang Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87	88,1	6.060.351.293	5.602.337.247	101,26%	ST	92,44%	ST
II. Urusan Pilihan										
1	Bidang Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	50694	60942	5.012.293.831	4.835.641.068	120,22%	ST	96,48%	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran mencapai kategori ST. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya kegiatan prioritas pada urusan pangan dan perikanan. Beberapa capaian kinerja kegiatan melebihi target. Kegiatan bidang pangan yang melebihi target diantaranya Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pola konsumsi masyarakat yang meningkat dan adanya peningkatan ketahanan pangan di nagari rawan pangan. Capaian di bidang urusan perikanan yang melebihi target capaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Budidaya Perikanan. Hal ini terjadi disebabkan oleh tercapainya sasaran kegiatan pendukung.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa atasi.
2. Agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 9 Januari 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si
NIP. 19700621 199303 1 001

Tabel E.60 (PMDN 86 / 2017)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
Prوده Pelaksanaan: TRIWULAN IV TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

